EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PEMERIKSAAN INTERN ATAS PENGENDALIAN KAS OLEH KESATUAN KONTROL INTERN (KKI) PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogar

Diajukan oleh :

RUSLI MULANA
NRP : 022196214
NIRM : 41043403960604

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR

2002

EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PEMERIKSAAN INTERN ATAS PENGENDALIAN KAS OLEH KESATUAN KONTROL INTERN (KKI) PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor

Menyetujui :

Dekan Fakultas Ekonomi,	Ketua Jurusan Akuntansi,
(Eddy Mulyadi S. Drs., Ak., MM)	(Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM)

EVALUASI TERHADAP KEGIATAN
PEMERIKSAAN INTERN ATAS PENGENDALIAN KAS
OLEH KESATUAN KONTROL INTERN (KKI) PADA
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) UNIT BISNIS
DISTRIBUSI JAWA BARAT

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor

Menyetujui :

Penguji,	Pembimbing,
(Hj. Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM)	1.(Monang Situmorang, Drs., Ak., MM)
	2. (Agus Uji Hantara, Drs., Ak.)

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pesti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya adzab Kami diwaktu malam dan siang, lalu Kami jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir".

(QS : Yunus : 24)

"Kebanaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu".

(QS : Al-Baqarah : 147)

"Putuslah amal scorang bani adam (manusia) ketika wafat, kecuali dalam tiga perkara, yaitu : amal zariah, anak (laki-laki) yang soleh, dan ilmu yang bermanfa'at".

(HR Buqhari-Muslim)

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Orang-orang yang paling kucintai dan kusayangi,

Papa, Mamah, dan adik-adiku (Teguh I G, Drian H dan Mia Puspita),

Serta seseorang yang akan menemaniku sampai akhir hayatku (Lilis Rahmawati).

Motto hidup :

Berani Mengambil Resiko

Dan Melakukan

Apa Yang Menjadi Kekurangan Kita.

(Rusli Mulana)

Pesan Kehidupan :

Memang Baik Menjadi Orang Penting.....,

Tetapi Jauh Lebih Penting

Menjadi Orang Baik.

(Bung Ebet Kadarusman)

ABSTRAK

Kesatuan Kontrol Intern (KKI) yang merupakan aparatur pengawasan intern yang bertugas membantu pimpinan perusahaan dalam mengadakan penilian atas sistem pengendalian yang ada serta memberikan saran-saran perbaikan.

Pemeriksaan Intern atas pengendalian kas dilakukan untuk memeriksa apakah pengendalian kas yang dilakukan perusahaan telah memadai, mengingat kas merupakan kekayaan perusahaan yang sulit diidentifikasi hak kepemilikannya, maka perusahaan harus mempertahankan uang kas yang mencukupi untuk membiayai operasi perusahaan juga untuk membayar kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pemeriksaan terhadap kas berpedoman pada program pemeriksaan kas yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi sistem pengendalian intern terhadap kas.

Oleh karena itu penulis mengambil judul : **"EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PEMERIKSAAN INTERN ATAS PENGENDALIAN KAS OLEH KESATUAN KONTROL INTERN (KKI) PADA PT PERUSAHAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT".**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengidentifikasi permasalahan yang berfokus pada kegiatan pemeriksaan intern dan pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas, serta menilai apakah kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas yang dilakukan oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat telah memadai.

Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis lakukan dengan cara studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek yang diteliti untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.

Kegiatan pemeriksaan intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas dilakukan KKI dengan menguji pengendalian intern kas melalui Kuesioner Pengendalian Intern terhadap kas dan pelaksanaan pemeriksaan yang mengacu pada program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan. KKI juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan yang bertujuan untuk mendapatkan temuan-temuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada agar dapat dirumuskan rekomendasi yang diperlukan sebagai dasar penyusunan pendapat dan kesimpulan.

Keberadaan KKI bagi pihak manajemen sangat membantu di dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, khususnya pemeriksaan terhadap kas. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan intern atas pengendalian kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sudah cukup memadai.

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis mencoba menyarankan agar KKI menyusun juga program kerja pemeriksaan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD), karena unit tersebut berkaitan secara langsung terhadap penerimaan kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sehingga kas yang masuk melalui unit tersebut dapat terkontrol.

KATA PENGANTAR

"Alhamdullillahirabbilallamin", penulis panjatkan rasa syukur ini hanya kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya tugas penyusunan skripsi yang berjudul **"EVALUASI TERHADAP KEGIATAN PEMERIKSAAN INTERN ATAS PENGENDALIAN KAS OLEH KESATUAN KONTROL INTERN (KKI) PADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT"**, dapat penulis selesaikan.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memenuhi ujian Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan hati yang terbuka menerima saran-saran dan kritik-kritik membangun dari pembaca sebagai sarana perbaikan dan bekal yang lebih baik dalam penyusunan karya tulis ilmiah lainnya dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya berdo'a, memberikan semangat serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, juga kepada adik-adikku tercinta (Teguh, Drian dan Mia).
2. Bapak Eddy Mulyadi S., Drs., Ak., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

3. Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Monang Situmorang, Drs., Ak., MM. dan Bapak Agus Uji Hantara, Drs.,Ak. Selaku Dosen Pembimbing dan Co. Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM, selaku Dosen Penguji skripsi bagi panulis.
6. Segenap staf pengajar Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor, yang telah memberikan pedoman ilmu kepada penulis guna penyusunan skripsi.
7. Bapak Agus Pranoto, Ir. Selaku General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset diperusahan yang Bapak pimpin.
8. Bapak Eddy Suparno, Drs. Selaku Deputi Manager Sekr & Umum PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.
9. Bapak A. Yulizar Jumhana, Ir. Selaku Pelaksana Harian Kepala KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.
10. Bapak Tatang, selaku Juru Utama Kepegawaian PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.
11. Bapak Adjid Hernawan, Drs. Selaku pembimbing dibagian KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

melakukan penilaian terhadap aktivitas perusahaan. Istiilah Bagian Audit Internal dilingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dikenal dengan SPI, sedangkan untuk tingkat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi itu sendiri disebut KKI. Kegiatan pemeriksaan Intern merupakan kegiatan yang terpadu yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perencanaan merupakan suatu proses yang mencakup penentuan terlebih dahulu bidang-bidang kerja yang akan dicakup dalam pemeriksaan, kebutuhan tenaga pemeriksa, prosedur yang akan dipakai dan sistematika pelaksanaan pemeriksaan. Tanpa adanya rencana kerja, akan timbul kecenderungan untuk menghindari atau menunda penugasan atau sebaliknya menunggu penugasan baru sehingga waktu tersita tanpa hasil. Oleh karena itu pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan selalu mengacu pada misi perusahaan. Pelaksanaam pemeriksaan terdiri dari empat tahapan yaitu persiapan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan finalisasi hasil pemeriksaan. Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan sarana komunikasi resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan infornasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada manajemen atau pejabat yang perlu mengetahui informasi tersebut. Setiap objek yang diperiksa harus melaksanakan rekomendasi yang telah dikemukakan oleh tim pemeriksa intern sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan penekanan atas pengendalian kas.

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam usaha mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan oleh penulis untuk penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan mengadakan :

1) ***Library Study*** **(Studi Pustaka)**

   Penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan beberapa buku yang ada sebagai landasan teori dari suatu kenyataan yang ada.

2) ***Field Study*** **(Studi Lapangan)**

   Penelitian dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian antara lain dengan cara :

   a) ***Observasi***, yaitu :

      Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung untuk mengetahui atau mendapatkan data yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan jalan melihat dan menganalisis dalam kegiatan objek penelitian.

   b) ***Interview***, yaitu :

      Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

   c) ***Kuesioner***, yaitu :

12. Keluarga besar Serang : Opah (alm), Omah, Wa Butje, Wa Yetty, Wa Iis, Bi Epi, Mang Toto (alm), Bi Yanti, Mang Ian, Mang Irman (alm), Bi Ima, dan Bi Mei.
13. Keluarga Besar Cikembar : Apa, Mamah, Teh Eni, Kak Cipto, Lilis Rahmawati dan Mia Amelia, serta keponakanku yang cantik Alya yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Yang tersayang Lilis Rahmawati, terima kasih atas do'a dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kakek (alm), Nenek, Om Mul dan Bi Imas, serta Anisa.
16. Sahabat –sahabatku : Dicky Rostiawan (Dev – Q), Wahyu Widodo (Dols), R. Ade jatnika, Beni Apriyanto, Riki, Wanto, Sudianto, Ade Suherdi, Dede Rohimat, Agus, dan Deni Wahyudin (Alm).
17. Yang tak terlupakan teman-temanku Wahyudi (Jeko), SE.,Herman Apriyadi (Abang), SE., Wahyudi Zurman Kusuma, SE. (Ibuth), Esti Hanimpuni, SE. (Kutil), Budi Santoso SE., Dwi, Iwan Kristian, SE., Indra Gunawan, SE., Nana Permana, SE., Andri Setiawan, SE., Roni Rahmansyah, SE., Sugih Widarto, SE., Susan, SE., Agustina, SE., Saeful Anwar, SE.,Nia Yuniarti, Rika Susilawati, Siti Nurul (Enung), Yuli Purwono (Jokaw), Atje Bahrum, Furqon Nasution, Atep, Eko, Chandra (Dakon), Rachman, dan Fikri (Kinem).
18. Brawidjaya Band : Dani (Abah), Ipul, Rendra, Uchie, dan Endhi.
19. Diaznoors Band : Deni (Jopek), Uchie, Lukman Hakim (Peceng), Erwin, Rendra, Nur Happy dan Indra (Enyum).
20. Keluarga Besar ***Cibadak Binaraga Club.***

21. My Favorite team ***Juventus*** : *Lippi, Trezeguet, Del Piero, Amoruso, Salas, Zalayeta, Tachinardi, Maresca, Davids, Pessoto, Zambrotta, Monterro, Nedved, Conte, Ferrara, Tudor, Parramati, Thuram, Iuliano, Bufon.*
22. Keluarga Besar Wisma Awal mekar : Pak Mansyur, Umi, Teh Euis, A Soheh, A Ence, Teh Neneng, Heru, Eman, Awal dan Ani.
23. Semua jajaran dan kru ***"InnovaSys Computer Rental"*** atas bantuan pengetikannya kepada penulis.
24. Serta semua pihak yang telah banyak mebantu baik moril mapun materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua amal baik, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari " ***Yang Maha Pengasih dan Penyayang"*** Allah SWT dan semoga rahmat dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua.Amin.

Bogor, Agustus 2002
Penulis,

RUSLI MULANA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur mempunyai suatu tujuan yaitu untuk memperoleh laba yang optimal. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan memerlukan manajemen di dalam perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian yang memadai terhadap semua sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan.

Kas adalah salah satu sumber daya ekonomi yang selalu menarik perhatian dan sangat mudah untuk diselewengkan. Mengingat sifat-sifatnya tersebut, maka mengelola kas dalam perusahaan memerlukan perhatian yang cukup serius. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengelola kas adalah perencanaan arus kas, pengendalian penerimaan kas, pengendalian pengeluaran kas, melakukan rekonsiliasi bank dan penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil.

Perusahaan harus mempertahankan uang kas yang mencukupi untuk operasionalnya dan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Setiap kelebihan kas harus diinvestasikan sementara guna menghasilkan keuntungan tambahan bagi perusahaan dan para pemegang saham. Manajemen kas yang efektif juga memerlukan pengendalian untuk melindungi kas terhadap pencurian dan penggelapan. Sistem pengendalian kas harus disesuaikan dengan

DAFTAR ISI

kekhususan usaha. Sistem pengendalian kas mempunyai karakteristik dasar seperti, menetapkan tanggungjawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas, pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas, penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari, sistem voucher untuk mengendalikan pengeluaran kas, audit internal pada selang waktu yang tak terduga, dan pencatatan ganda atas kas. Pengendalian semacam ini cenderung lebih banyak diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan banyak karyawan.

Dengan adanya keterbatasan yang dimiliki manajemen dalam mengontrol jalannya perusahaan, maka dibentuklah bagian Audit Internal untuk membantu manajemen yang berfungsi sebagai pengawas. Istilah bagian Audit Internal didalam lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dikenal dengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI), sedangkan untuk tingkat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi sendiri disebut Kesatuan Kontrol Intern (KKI). Dengan berfungsinya bagian Audit Internal, akan turut membantu tercapainya target dan sasaran yang telah digariskan dengan cara melakukan aktivitas pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dan menyampaikan berbagai analisis, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam membentuk Bagian Audit Internal adalah status Bagian Audit Internal yang mencakup struktur organisasi, tugas dan wewenang Bagian Audit Internal dalam perusahaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dijalankan oleh

Bagian Audit Internal. Status Bagian Audit Internal harus dapat menunjang independensi dan objektivitas, sedangkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan merupakan kegiatan yang terpadu yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk memilih judul : **"Evaluasi Terhadap Kegiatan Pemeriksaan Intern Atas Pengendalian Kas Oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat".**

Dari uraian diatas maka penulis mengidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

a) Bagaimana kegiatan pemeriksaan intern dan pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat ?
b) Apakah kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas yang dilakukan oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat telah memadai ?

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai hal-hal yang berhubungan dengan judul skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.

Tujuan dari peneiltian ini adalah :

a) Untuk mengetahui kegiatan pemeriksaan intern dan pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

b) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas yang dilakukan Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

1.3. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

a) Untuk perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berguna bagi pihak manajemen khususnya bagian Kesatuan Kontrol Intern (KKI) yang telah dilakukan penelitian kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas.

b) Untuk penulis sendiri, diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah, khususnya mengenai kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas dan juga untuk melatih diri menyusun karya ilmiah serta mengembangkan kemampuan dimasa yang akan datang.

pengeluaran kas, melakukan rekonsiliasi bank dan sistem dana tetap untuk kas kecil.

Sistem pengendalian kas harus memenuhi karakteristik dasar seperti menetapkan tanggungjawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas, pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas, penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari ke bank, sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran kas, audit internal pada selang waktu yang tak terduga dan pencatatan ganda atas kas menurut bank dan pembukuan, dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh seseorang diluar bagian akuntansi. Pengendalian semacam ini cenderung lebih banyak diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Manajemen sedapat mungkin menjalankan pengendalian internal yang efektif dan efisien, untuk mengurangi peluang-peluang pencurian, penggelapan dan kesalahan yang tidak disengaja dalam akuntansi dan pengendalian kas. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh manajemen maka manajemen tidak mungkin dapat mencurahkan perhatiannya kepada seluruh aspek pengelolaan yang ada. Oleh sebab itu manajemen membutuhkan suatu organisasi yang independen untuk membantu manajemen dalam melakukan pengendalian terhadap jalannya perusahaan khususnya pengendalian terhadap kas, dengan membentuk Bagian Audit Internal yang berfungsi sebagai pengawas.

Bagian Audit Internal dalam perusahaan sangat diperlukan guna membantu manajemen dalam mengelola dan mengendalikan jalannya perusahaan, adapun tugas dari Bagian Audit Internal itu sendiri adalah

Teknik pengumpulan data dengan memberikan angket pertanyaan tertulis kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dan responden hanya menjawab "Ya dan Tidak" di dalam angket pertanyaan tersebut.

1.6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, yaitu berlokasi di Jl. Cikapundung No. 2 Bandung, Jawa Barat.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini, penulis mengemukakan sistematika pembahasan secara ringkas yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi hal-hal yang bersifat umum yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang meliputi latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teoretis yang membatasi dan menunjang masalah yang menjadi objek penelitian skripsi yang meliputi pemeriksaan intern dalam suatu organisasi, terdiri dari pengertian

pemeriksaan intern, wewenang dan tanggung jawab pemeriksaan intern, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan intern dan pengendalian mutu pemeriksaan intern. Kegiatan pemeriksaan intern, terdiri dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan intern atas pengendalian kas, terdiri dari pengertian pengendalian, pengertian kas, pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran kas, tujuan pemeriksaan intern atas pengendalian kas, program pemeriksaan intern atas pengendalian kas. Evaluasi terhadap kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas oleh kesatuan kontrol intern.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai objek penelitian yang meliputi tinjauan umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi beserta uraian kerja masing-masing bagian. Tinjauan khusus perusahaan yang terdiri dari aktivitas perusahaan serta membahas metode penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang kegiatan pemeriksaan intern dan pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, terdiri dari kegiatan pemeriksaan intern yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern atas pengendalian kas. Pelaksanaan pemeriksaan

intern atas pengendalian kas, meliputi kebijakan pengendalian kas, tujuan pemeriksaan kas, pelaksanaan pemeriksaan kas, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Evaluasi terhadap kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalaian kas oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusaahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

BAB V RANGKUMAN KESELURUHAN

Bab ini memaparkan rangkuman keseluruhan dari bab I sampai dengan bab IV.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan dari hasil evaluasi pada bab IV dan penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai judul-judul buku dan nama-nama pengarang yang telah dipergunakan selama penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN

Maksud dari lampiran adalah dokumen-dokumen yang dipergunakan perusahaan yang dicantumkan oleh penulis guna menunjang penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemeriksaan Intern Dalam Suatu Organisasi Dan Kegiatan Pemeriksaan Intern

2.1.1. Pemeriksaan Intern Dalam Suatu Organisasi

Struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai alat manajemen dalam mengelola perusahaan. Pada perusahaan kecil, manajemen dapat mengendalikan langsung para bawahannya dan pemeriksaan internnya dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung. Sedangkan pada perusahaan yang telah berkembang dan perusahaan besar, manajemen tidak mampu lagi melakukan pengamatan secara langsung dan sulit untuk melakukan penilaian atas efektifitas sistem pengendalian yang telah diberlakukan di dalam perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan suatu orgainsasi yang independen yang disebut bagian pemeriksaan intern yang bertugas membantu manajemen melakukan penilaian terhadap aktivitas perusahaan.

2.1.1.1. Pengertian Pemeriksaan Intern

Pengertian pemeriksaan intern menurut **Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak.,MBA** dalam bukunya **"Struktur Pengendalian Intern"**, bahwa :

> **Pemeriksaan intern adalah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan yang bersifat proteksi (melindungi) dan konstruktif bagi pemimpin perusahaan. (2 : 51)**

Sedangkan menurut **Bambang Hartadi** dalam buku **"Internal Auditing : Suatu Tujuan Sistem Informasi Manajemen dan Cara Pelaporannya"**, yaitu :

> **Pemeriksaan intern adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif oleh auditor intern tentang operasi dan pengendalian yang bermacam-macam dalam suatu organisasi untuk menetukan apakah :**
> 1. **Informasi keuangan dan operasi tepat dan dapat dipercaya.**
> 2. **Kemungkinan perusahaan untuk merugi diketahui dan diminimalisasi.**
> 3. **Peraturan-peraturan eksternal, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur intern yang ditetapkan diikuti.**
> 4. **Standar yang memuaskan dipenuhi.**
> 5. **Sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis.**
> 6. **Sasaran organisasi telah dicapai secara efektif.**
>
> **(5 : 63-64)**

Standard for The Professional Practice of Internal Auditing yang diterbitkan tahun 1978 memberikan rumusan mengenai **pengertian pemeriksaan intern** sebagai berikut : **"Internal auditing is an independent appraisal function**

estabilished within an organization to examine an evaluate its activities as a service to the organization". **(21 : 839)**

Dari ketiga pengertian di atas penulis memberikan suatu simpulan bahwa pemeriksaan intern adalah suatu kegiatan penilaian yang independen, sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal guna menguji dan mengevaluasi kecermatan dan keberhasilan dari sistem pengendalian manajemen dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan saran-saran kepada manajemen.

2.1.1.2. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern harus mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan ditetapkan secara tertulis oleh manajemen perusahaan. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas berarti ada dukungan yang kuat dari manajemen bagi pemeriksaan intern sehingga pemeriksaan intern dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Pendapat mengenai **tanggung jawab pemeriksaan intern** yang disampaikan oleh **Bambang Hartadi** dan **Subekti Jamaluddin** dalam buku **"Auditing II : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap pelaksanaan"**, sebagai berikut :

Tanggung jawab pemeriksaan intern meliputi antara lain :

1) **Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan, yang terdiri :**
   a) **Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur.**
   b) **Mengembangkan dan memperbaiki prosedur.**
   c) **Menilai personalia.**
   d) **Ide-ide seperti pembuatan standar atau pembuatan metode yang baik.**
2) **Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut :**
   a) **Menelaah data yang dihasilkan sistem akuntansi guna membuktikan bahwa laporan-laporan yang dihasilkan adalan benar (*valid*) dan,**
   b) **Membuat analisis-analisis lebih banyak untuk memberikan dasar atau membantu penyimpulan-penyimpulannya.**
3) **Verifikasi kelayakan, yaitu untuk menentukan :**
   a) **Prosedur akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah di lakukan .**
   b) **Prosedur operasi atau kegiatan yang telah diikuti.**
   c) **Peraturan-peraturan pemerintah yang telah dilaksanakan.**
   d) **Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak telah berjalan dan dipatuhi.**
4) **Fungsi perlindungan, mengadakan perlindungan untuk :**
   a) **Menghindari dan menemukan penggelapan, ketidakjujuran dan kecurangan.**
   b) **Memeriksa semua kekayaan perusahaan.**
   c) **Meneliti transaksi dengan pihak luar. (6 : 25-26)**

Menurut **Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak., MBA.,** dalam buku "**Auditing : Suatu Pengantar** ", bahwa :

> **Tugas, wewenang dan tanggung jawab departemen pemeriksaan intern harus didefinisikan secara tertulis dan resmi dalam anggaran dasar departemen pemeriksaan intern dan disetujui oleh manajemen dan direksi. Anggaran dasar harus menyatakan dengan jelas tugas manajemen pemeriksaan intern, menetapkan ruang lingkup pekerjaannya, dan menyatakan pemeriksaan intern tidak berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan objek yang diperiksanya. (1 : 140)**

Penulis memberikan suatu simpulan bahwa mengenai tanggung jawab pemeriksaan intern tercermin pada tugas yang dibebankan padanya. Tanggung jawab tersebut umumnya meliputi pemberian informasi dan saran kepada manajemen dan melakukan koordinasi antara kegiatan pemeriksaan intern dengan kegiatan manajemen, sehingga tujuan pemeriksaan dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara bersamaan.

2.1.1.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab langsung kepada pejabat yang berwenang, dimana pejabat tersebut memberikan dukungan kepada pemeriksa intern dalam melakukan tugasnya secara independen, menjamin tidak ada pembatasan ruang lingkup pemeriksaan, dan mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan serta melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang direkomendasikan oleh pemeriksa intern.

Ruang lingkup pemeriksaan intern meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup tersebut dapat mencakup seluruh kegiatan atau program atau hanya mencakup bagian tertentu dari suatu kegiatan atau program.

Menurut **Arthur W. Holmes** dan **David C. Burns** dalam buku **"Auditing"**, yang dialihbahas akan oleh **Marianus**

Sinaga, SE., Ak., dalam buku "Auditing : Norma dan Prosedur", sebagai berikut :

> **Sasaran auditing internal adalah untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberikan kepada mereka itu analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan yang telah direviu. Auditor internal berurusan dengan semua tahapan kegiatan usaha, dimana dia dapat memberikan jasanya kepada manajemen. Ini berada diluar lingkup akuntansi dan catatan keuangan, guna memahami benar-benar segala operasi yang menjadi bahan reviu. (12:154)**

Menurut **Hiro Tugiman** dalam bukunya "Pengenalan Internal Audit", ruang lingkup pemeriksaan intern pada BUMN atau BUMD secara menyeluruh sesuai dengan Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD meliputi :

1) **Memeriksa Ketaatan dan Keuangan**
   Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan terhadap ketaatan dan kegiatan keuangan yang ada.
   Tujuannya adalah untuk menentukan apakah objek yang diperiksa :
   a) **Mentaati ketentuan yang berlaku.**
   b) **Melaksanakan pengendalian dengan baik terhadap kegiatan keuangannya.**
   c) **Melakukan pencatatan yang memadai atas semua transaksi yang terjadi.**
   d) **Telah menyusun laporan keuangan dan kegiatan secara lengkap, dapat dipercaya, dan tepat waktu.**
2) **Pemeriksaan Kehematan**
   Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan mengenai apakah sumber dana dan sumber daya perusahaan telah dimanfaatkan secara hemat dan efisien.
3) **Pemeriksaan Hasil Program**
   Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan terhadap tingkat pencapaian hasil program, apakah dilaksanakan

secara tepat dalam pencapaian tujuan, atau bahkan melebihi.
Auditor menilai setiap kebijakan, prosedur, dan praktek yang dilaksanakan, serta unsur pengendalian manajemen lainnya, yang berperan penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. (10 : 12-13)

2.1.1.4. Pengendalian Mutu Pemeriksaan Intern

Suatu organisasi pemeriksaan harus dapat menjamin bahwa jasa yang diberikan adalah jasa profesional dan harus memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan norma profesional. Untuk itu organisasi pemeriksaan harus memiliki suatu sistem pengendalian mutu yang dapat mencapai tujuan tersebut.

Pengendalian mutu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada pemakai jasa.

Menurut **Soekrisno Agoes**, dalam bukunya "**Auditing**" mengemukakan **enam unsur pengendalian mutu internal audit departemen yang efektif** :

1) **Independen**
2) **Job Description**
3) **Internal audit manual**
4) **Dukungan yang kuat dari top managemen**
5) **Pengangkatan auditor**
6) **Internal audit harus bisa bekerjaama dengan akuntan publik (20 : 221)**

Kebijakan dan prosedur pengendalian mutu diatas harus dikomunikasikan kepada semua pegawainya agar diperoleh kepastian bahwa kebijakan dan prosedur tersebut diterapkan.

2.1.2. Kegiatan Pemeriksaan Intern

Kegiatan pemeriksaan intern merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Seluruh kegiatan ini memiliki hubungan satu sama lainnya dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan intern secara terpadu.

2.1.2.1. Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan merupakan dasar bagi proses manajemen agar perusahaan peka terhadap peluang dan ancaman dari luar, dengan menentukan yang diinginkan, serta mengembangkan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan merupakan dasar bagi berjalannya fungsi pengendalian, karena tanpa adanya perencanaan maka tidak ada dasar untuk melakukan fungsi pengendalian.

Rencana pemeriksaan terdiri dari rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang meliputi kurun waktu lebih dari satu tahun. Sedangkan rencana jangka pendek meliputi jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rencana jangka pendek merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan selama satu tahun.

Menurut **Hiro Tugiman,** dalam buku **"Standar Profesional Audit Internal"**, perencanaan pemeriksaan harus didokumentasikan dan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) **Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan.**
2) **Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa.**
3) **Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.**
4) **Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.**
5) **Melaksanakan survai secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.**
6) **Penulisan program pemeriksaan.**
7) **Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan.**
8) **Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.** (11 : 53)

Pedoman di atas sangat berguna bagi penyusunan rencana pemeriksaan, karena perkiraan yang direncanakan dengan baik mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang baik pula dibandingkan dengan rencana yang dibuat secara sembarang.

2.1.2.2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan pemeriksaan ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti mengumpulkan, menganalisis, mengintreprestasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka menurut **Hiro Tugiman** dalam buku **"Standar Profesional Audit Internal"**, pelaksanaan pemeriksaan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a) **Berbagai informasi tentang seluruh informasi yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan bentuk kerja haruslah dikumpulkan.**
b) **Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi.**
c) **Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan meghendaki demikian.**
d) **Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.**
e) **Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh pemeriksa dan ditinjau atau direview oleh manajemen bagian audit internal. (11 : 59)**

Informasi yang diperoleh dari setiap pelaksanaan harus dituangkan secara tertulis dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan ini berisi langkah-langkah kerja

pemeriksaan yang telah ditempuh, pengujian yang telah dilakukan, data atau informasi yang telah diperoleh serta kesimpulan hasil pemeriksaan.

2.1.2.3. Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan merupakan sarana komunikasi resmi dan penting bagi pemeriksa untuk memberikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada manajemen. Laporan tersebut harus disusun dengan format yang sedemikian rupa sehingga dapat memuat informasi penting yang perlu dilaporkan, mudah dibaca dan dimengerti.

Menurut **Amin Widjaja Tunggal** dalam buku **"Auditing : Suatu Pengantar"**, Pemeriksa Intern harus menyampaikan laporan hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukannya dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) **Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan selesai laporan intern baik secara tertulis maupun lisan dapat juga disampaikan.**
2) **Pemeriksaan intern harus mendiskusikan temuan-temuan pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dengan manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi tersebut.**
3) **Laporan harus objektif, jelas, singkat tetapi padat membangun dan tepat waktu.**

4) **Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil pemeriksaan dan bila mungkin, laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor.**
5) **Laporan dapat berisi rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atas prestasi yang dicapai dan tindakan perbaikan.**
6) **Pandangan bagian yang diperiksa mengenai kesimpulan atau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat juga dimasukkan dalam laporan.**
7) **Kepala bagian departemen pemeriksaan intern terlebih dahulu harus menelaah kembali dan menyetujui laporan pemeriksaan itu sebelum dikeluarkan, harus menentukan kepada siapa saja laporan itu akan diedarkan.** (1 : 153)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh **Hiro Tugiman,** dalam buku **"Standar Profesional Audit Internal"**, bahwa **tindak lanjut hasil pemeriksaan** harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) **Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektivan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.**
2) **Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam ketentuan yang memuat tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal.**
3) **Manajemen bertanggung jawab menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tanggapan terhadap temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Pimpinan audit internal bertanggung jawab memperkirakan tindakan manajemen yang diperlukan, agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan tersebut dapat dipecahkan secara tepat waktu.**
4) **Manajemen senior dapat menetapkan untuk menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap keadaan yang dilaporkan, berdasarkan pertimbangan biaya atau pertimbangan lainnya.**
5) **Sifat, ketepatan waktu, dan luas tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan audit internal.**

6) **Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah :**
   a) **Temuan yang dilaporkan.**
   b) **Tingkat usaha dan biaya untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan.**
   c) **Risiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif gagal.**
   d) **Tingkat kesulitan pelaksanaan tindakan korektif.**
   e) **Jangka waktu yang dibutuhkan.**
7) **Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan segera memerlukan tindakan manajemen.**
8) **Terdapat pula berbagai keadaan dimana pimpinan audit intenal menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen telah cukup, bila dibandingkan dengan pentingnya temuan pemeriksaan.**
9) **Pemeriksa harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap temuan pemeriksaan memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari dilakukannya tindakan tersebut.**
10) **Pimpinan unit audit internal bertanggung jawab membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan.**
11) **Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada risiko dan kerugian yang terkait, juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif.**
12) **Pimpinan audit internal harus menetapakan berbagai prosedur.**
13) **Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut secara efektif. (11 : 75)**

2.2. Pemeriksaan Intern Atas Pengendalian Kas

Pemeriksaan intern atas pengendalian kas dilakukan oleh pemeriksa intern untuk memeriksa apakah pengendalian kas yang dilakukan perusahaan telah memadai, karena kas merupakan kekayaan perusahaan yang sulit diidetifikasi hak pemiliknya, maka perusahaan harus mempertahankan uang kas

yang mencukupi untuk membiayai opersi perusahaan dan juga untuk membayar kewajiban-kewajiban pada saat jatuh tempo.

2.2.1. Pengertian Pengendalian

Salah satu dari fungsi yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan fungsi manajemen secara keseluruhan adalah pengendalian. Untuk itu pengendalian harus mendapat perhatian dari manajemen yang sama baiknya dengan fungsi lainnya.

Pengertian pengendalian menurut **Lawrence H. Hammer, William K. Carter and Milton F. Usry** dalam buku " **Cost Accounting**", adalah: "**Control is managements systematic effort to achieve objectives by comparing performance to plans and taking appropriate action to correct important differences**". (9 : 5)

Menurut **Arief Suadi** dalam buku "**Sistem Pengendalian Manajemen**",bahwa " **Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya**". (4 : 3)

Menurut **RA. Supriyono** dalam buku "**Akuntansi Manajemen**", bahwa "**Pengendalian menunjukkan monitoring dan evaluasi prestasi untuk menentukan tingkat kesesuaian tindakan dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya**". (17 : 73)

Sedangkan **Firdaus A. Dunia** dalam buku "**Modul Pengantar Akuntansi I**", bahwa : "**Pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah**

dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan". **(8 : 126)**

Dari keempat pengertian tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa pengendalian adalah usaha sistematis perusahaan untuk melakukan monitoring dan evaluasi prestasi kerja dengan cara membandingkan antara rencana dengan prestasi kerjanya dan menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

2.2.2. Pengertian Kas

Kas merupakan salah satu pos yang paling penting dalam neraca, karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian kita, kas terlibat secara langsung maupun tidak langsung hampir disetiap transaksi usaha.

Pengertian kas menurut **M. Munandar** dalam buku"**Pokok-Pokok Intermediate Accounting**", adalah :

> **Kas ialah semua uang kertas dan logam, baik mata uang dalam negeri maupun luar negeri, serta surat-surat yang mempunyai sifat seperti mata uang, yaitu sifat dapat segera dipergunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran pada setiap saat dikehendaki.** **(16 : 32)**

Menurut **Waren, Fess, Reeve** dalam buku " **Accounting** " mendefinisikan bahwa : "**Cash is coin currency (paper money), checks, money order and money on deposit that is available for unrestricted withdrawl from banks or other financial institution".**

(23 : 251)

Sedangkan menurut **Standar Akuntansi keuangan (PSAK No.9)** adalah: **"Kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan".**

(13 : 9.2)

Dari ketiga pengertian diatas dapat ditarik suatu simpulan bahwa kas merupakan alat tukar atau alat pembayaran berupa mata uang atau surat-surat yang mempunyai sifat seperti mata uang yang siap dan bebas dipergunakan untuk dibiayai kegiatan umum perusahaan.

2.2.3. Pengendalian atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pengendalian kas menghendaki agar uang kas dijaga dengan aman, sehingga tidak memungkinkan terjadi adanya pengeluaran tanpa persetujuan yang berwenang dan tanggungjawab atas pengeluaran uang kas harus berada pada satu tangan, dalam melakukan pengendalian kas hendaknya perusahaan memperhatikan unsur-unsur pengendalian kas.

Menurut **Mulyadi** dalam buku **"Pemeriksaan Akuntan"** menguraikan **Unsur-unsur pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran kas** sebagai berikut :

1) **Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.**
2) **Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh fungsi penyimpanan kas sejak awal sampai akhir, tanpa ada campur tangan dari fungsi yang lain.**
3) **Penerimaan kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang.**
4) **Pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang.**

5) **Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari yang berwenang.**
6) **Pencatatan di dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas harus didasarkan bukti kas masuk dan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari yang berwenang dan dilampiri dokumen pendukung yang lengkap.**
7) **Saldo kas yang ada ditangan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.**
8) **Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap "Lunas" oleh fungsi penyimpanan kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.**
9) **Penggunaan rekening koran bank (bank statement) yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan dan penyimpanan kas (Bagian Pemeriksaan Intern).**
10) **Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerima pembayaran atau dengan pemindahbukuan.**
11) **Jika pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah kas kecil, pengeluaran ini dilakukan lewat dana kas kecil yang akuntansinya diselenggarakan dengan sistem Imprest.**
12) **Secara periodik diadakan pencocokkan jumlah fisik kas yang ada ditangan dengan jumlah kas menurut catatan.**
13) **Kas yang ada ditangan dan kas yang ada diperjalanan diasuransikan dari kerugian.**
14) **Kasir diasuransikan (Fidelity Bond Insurance).**
15) **Kasir diperlengkapi dengan alat-alat yang dapat mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada ditangan (misalnya mesin register kas, almari besi).**
16) **Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kassa.** **(15 : 427)**

2.2.4. Tujuan Pemeriksaan Kas

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap kas pemeriksa menetapkan terlebih dahulu tujuan pemeriksaan kas agar memudahkan pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap kas.

Menurut **Bambang Hartadi** dan **Subekti Djamaluddin**, dalam buku " **Auditing II : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pelaksanaan** ", Tujuan Pemeriksaan Kas adalah sebagai berikut :

1) **Mempelajari dan mengevaluasi system pengendalian intern terhadap transaksi kas.**
2) **Menentukan bahwa kas secara wajar disajikan dalam laporan keuangan.** **(6 : 43)**

Menurut **Sukrisno Agoes** dalam bukunya **"Auditing"**, Tujuan Pemeriksaan Kas, sebagai berikut :

1) **Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas kas dan bank serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank.**
2) **Untuk memeriksa apakah saldo kas dan bank yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan.**
3) **Untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan bank.**
4) **Untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan bank dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonfersikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke rugi laba tahun berjalan.**
5) **Untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.** **(19 : 120)**

Kemudian menurut **Theodorus M. Tuanakotta** dalam buku **"Auditing : Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik"**, Tujuan pemeriksaan kas adalah :

> **Untuk meyakinkan diri bahwa saldo kas dan bank yang tercantum didalam neraca benar-benar ada di dalam perusahaan dan pada bank yang bersangkutan pada tanggal neraca dan bahwa penyajian kas, bank dan dana-dana liquid lainnya di dalam neraca telah dilakukan dengan tepat. (22:150)**

Sedangkan menurut **Mulyadi** dalam bukunya "**Pemeriksaan Akuntan**", Tujuan Pemeriksaan Kas, antara lain :

1) **Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan kas.**
2) **Membuktikan eksistensi kas yang dicantumkan ke dalam neraca.**
3) **Membuktikan ketepatan pisah batas (*cut off*).**
4) **Membuktikan kewajaran penyajian kas di dalam neraca.**
5) **Membuktikan kemungkinan terjadinya penggelapan terhadap kas.** **(15 : 449)**

Dari keempat pendapat di atas penulis memberikan suatu kesimpulan bahwa tujuan pemeriksaan kas adalah (1) mempelajari dan mengevaluasi sistem pengendalian intern terhadap kas, (2) memeriksa saldo kas dan bank yang ada dineraca benar-benar milik perusahaan, (3) memeriksa kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan, (4) menilai ketepatan jumlah dan penyajian saldo kas dalam neraca.

2.2.5. Program Pemeriksaan Kas

Pemeriksaan intern dalam melakukan pemeriksaan mengacu pada program pemeriksaan kas yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Menurut **Bambang Hartadi** dan **Subekti Djamaluddin**, dalam buku " **Auditing II : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Terhadap Pelaksanaan** ", mendefinisikan Program pangendalian kas adalah :

1) **Dapatkan deskripsi system pengendalian intern untuk pemeriksaan intern atas kas.**
2) **Adakan pengujian terhadap transaksi kas.**

3) **Lakukan penilaian system pengendalian intern terhadap kas.**
4) **Hitung dan daftar semua uang yang ada di perusahaan dan verifikasi cut off penerimaan kas dan pengeluaran kas.**
5) **Kirim surat konfirmasi ke bank untuk memverifikasi setoran-setoran.**
6) **Dapatkan atau siapkan rekonsiliasi bank pada tanggal neraca.**

(6 : 47)

Sedangkan program pemeriksaan kas menurut **Ruchyat Kosasih** dalam buku **"Auditing : Prinsip dan Prosedur"**, adalah:

1) **Digunakan imprest fund system.**
2) **Jumlah semua saldo kas sesuai dengan saldo buku kas besar.**
3) **Dipergunakan voucher kas.**
4) **Ikthisar bukti pengeluaran kas kecil selalu dibuat pada saat pengisian kembali saldo kas. (18 : 407)**

Dari kedua pendapat diatas penulis menarik suatu kesimpulan bahwa program pemeriksaan kas merupakan acuan bagi pemeriksa didalam melakukan pemeriksaan terhadap kas sehingga tujuan pemeriksaan kas dapat dicapai.

2.3.Evaluasi Terhadap Kegiatan Pemeriksaan Intern Atas Pengendalian Kas Oleh Kesatuan Kontrol Intern

Pemeriksaan intern dalam suatu perusahaan sangat diperlukan guna membantu manajemen dalam mengelola dan mengendalikan perusahaan, dimana tugas dari pemeriksaan intern itu sendiri adalah melakukan penilaian terhadap aktivitas perusahaan. Kegiatan pemeriksaan intern bebas dari pengaruh pihak-pihak lain yang ada dalam perusahaan sehingga pekerjaannya dapat memberikan gambaran yang objektif dimana kegiatan pemeriksaan yang dicakup oleh

pemeriksaan intern meliputi seluruh kegiatan yang ada didalam perusahaan dan manfaat dari pemeriksaan intern itu harus disadari oleh manajemen, karena sifatnya sebagai pemberi jasa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pemeriksaan intern bebas dari pengaruh pihak-pihak lain, maka kedudukan pemeriksaan intern menjamin adanya independensi yang nyata dan memperoleh dukungan dari manajemen. Sedangkan tanggungjawab pemeriksaan intern meliputi pemberian informasi dan rekomendasi kepada manajemen serta melakukan koordinasi antara kegiatan pemeriksaan intern dengan kegiatan manajemen.

Kegiatan pemeriksaan intern meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dimana seluruh kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang terpadu dan mempumyai hubungan satu sama lainnya didalam keberhasilan tugas pemeriksaan intern secara keseluruhan. Perencanaan pemeriksaan merupakan proses menentukan terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya. Perencanaan pemeriksaan harus dibuat dan dituangkan secara tertulis dalam program pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan merupakan realisasi dari perencanaan pemeriksaan. Kegiatan dalam pelaksanaan pemeriksaan mencakup kegiatan pengumpulan, pengelompokan, serta pengujian dan penilaian informasi dengan menggunakan prosedur dan tekhnik pemeriksaan yang telah ditentukan. Setiap pemeriksa wajib untuk melaporkan setiap hasil pemeriksaannya yang telah dilaksanakan kepada pejabat

yang berwenang tepat pada waktunya agar informasi yang terkandung didalamnya dapat bermanfaat sepenuhnya. Kegiatan terakhir dari aktivitas pemeriksaan adalah memantau tindak lanjut dari temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan intern atas pengendalian kas dilakukan oleh pemeriksa intern untuk memeriksa apakah pengendalian kas yang dilakukan perusahaan telah memadai, karena kas merupakan kekayaan perusahaan yang sulit diidentifikasi hak pemiliknya, maka perusahaan harus mempertahankan uang kas yang mencukupi untuk membiayai operasi perusahaan juga untuk membayar kewajiban-kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pemeriksa intern harus memperhatikan unsur-unsur pengendalian intern terhadap kas. Pemeriksaan terhadap kas harus berpedoman pada program pemeriksaan kas yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi system pengendalian intern terhadap kas. Dari uraian diatas penulis menyimpulkan kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas sudah cukup memadai.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

3.1.1. Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-IX, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergerak dalam bidang gas memperluas usahanya dalam bidang listrik untuk kemanfaatan umum. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk S'LANDS WATERKRACHT BEDRIJVEN (LWB) yang bertugas dan bergerak dibidang:

1. Pengusahaan pembangkit tenaga listrik.
2. Penyaluran tenaga listrik yang mempunyai wilayah kerja di Indonesia.

Adapun Perusahaan Listrik Negara yang dikelola oleh LWB PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok-Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun,

PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU Jakarta. Selain itu beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan – perusahaan distrik Kotapraja.

Di Jawa Barat (Khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu Bandoengsche Electriciteit Maatschappij (BEM) yang berdiri pada tahun 1905. Pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahaan Perseroan Gemeenschappelijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng (GEBEO) Yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaris Mr. Andriaan Hendrik Van Ophuisen No. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh Djawa Dengki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha dengan wilayah kerja diseluruh Pulau Jawa.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambil alih oleh Pemerintah RI yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda yang pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN), sebagai wadah kesatuan Pimpinan PLN. Kemudian istilah PLN Bandung di ganti dengan nama PLN

Exploitasi XI sebagai kesatuan BPU_PLN di Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tanggerang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri PUTL Nomor 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat. (Lembaran Negara No. 34 tahun 1994).

3.1.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi yang ada di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berbentuk Lini dan Staf. Dalam mengelola jalannya perusahaan dikelola oleh suatu Manager. Pimpinan perusahaan sebagai Top Manajemen dipimpin oleh seorang General Manager. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

1) Memegang kekuasaan penuh yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas perusahaan.
2) Menetapkan arah strategis dan kebijaksanaan perusahaan dan pengembangannya.
3) Menyiapkan rencana dan anggaran kerja tahunan.
4) Menetapkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab pada setiap Manager yang dipimpinnya.
5) Mengadakan organisasi perusahaan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha.

Pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh tujuh Kepala Pelaksana Harian Manager dan satu Pelaksana Harian Kesatuan Kontrol Intern, yaitu :

1) Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha
2) Manajer Operasi
3) Manajer Niaga

4) Manajer Keuangan

5) Manajer Organisasi dan SDM

6) Manajer Umum

7) Manajer Teknologi Informasi

8) Kepala Kesatuan Kontrol Intern

Kesatuan Kontrol Intern (KKI).

(1) Kepala KKI

Tugasnya :

a) Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran, rencana pemeriksaan jangka pendek dan jangka panjang, serta quality objective Kesatuan Kontrol Intern.

b) Mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan, standar, sistem dan prosedur pemeriksaan serta program-program kerja pemeriksaan setiap unit kerja atau fungsi organisasi perusahaan

c) Menugaskan tim pemeriksa untuk melaksanakan evaluasi atau pemeriksaan uang, operasional dan khusus sesuai dengan norma, standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

d) Mengarahkan dan mengkoordinasikan tim pemeriksa baik dalam penyusunan rencana dan pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan maupun finalisasi hasil pemeriksaan agar sesuai dengan sasaran dan faktor risiko yang telah ditetapkan.

e) Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan tindak lanjut dengan manajemen perusahaan agar pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efesien.

f) Menandatangani seluruh laporan yang diterbitkan Kesatuan Kontrol intern seperti laporan hasil pemeriksaan, management letter, laporan-laporan evaluasi sistem pengendalian intern, laporan evaluasi tindak lanjut, laporan pencapaian quality objective dan lain-lain.

g) Menilai dan merekomendasikan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen unit operasional untuk menjamin kesesuaiannya dengan peraturan pemerintah dan peraturan kebijakan perusahaan.

h) Menjalin hubungan kerja yang baik dengan manajemen perusahaan dan pihak luar seperti BPIS, BPK, BPKP, FK-SPI, dan lain-lain.

i) Melaksanakan tugas berdasarkan quality system perusahaan.

(2) Sekretaris Kepala KKI

Tugasnya :

a) Mengetik konsep surat dinas yang diperintahkan kepala KKI, mengadakan surat atau dokumen-dokumen penting dan mendistribusikannya.

b) Mengatur surat yang masuk maupun keluar serta menyimpan surat yang sifat dan kegunaannya khusus, rahasia, sangat penting secara sistematis.

c) Mengatur dan menyerahkan surat-surat masuk yang bersifat umum dan menunjang proses pemeriksaan, laporan-laporan, sistem, prosedur, kontrak-kontrak serta peraturan baru dari pemerintah kepada administrator pemeriksaan sesuai disposisi Kepala KKI.

d) Melakukan pengaturan penyerahan surat-surat masuk untuk pelatihan atau seminar kepada Kepala KKI serta menyampaikan kepada yang terkait dan berkepentingan sesuai disposisi Kepala KKI.

e) Mengatur surat-surat, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala KKI sesuai dengan prioritasnya.

(3) Staf Pengembangan Madya

Tugasnya :

a) Merumuskan dan merencanakan kegiatan staff pengembangan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran KKI.

b) Menyiapkan materi kajian Kepala KKI dalam melakukan analisis dan menjabarkan gagasan-gagasan untuk pernyempurnaan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen unit operasional.

c) Melakukan perumusan dan pengembangan sistem dan prosedur serta teknik pemeriksaan secara sistematis, efektif dan efisien.

d) Melakukan perrumusan dan pengembangan dalam menjabarkan gagasan-gagasan untuk penyempurnaan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen KKI.

e) Melakukan pengkajian ilmiah untuk mengembangkan dan mencari solusi atas masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi pada aktivitas pemeriksaan.

(4) Staf Pengembangan Pertama

Tugasnya :

a) Mengevaluasi sistem dan prosedur serta tekhnik pelaksanaan pemeriksaan secara sistematis, efektif dan efisien.

b) Menyampaikan usulan-usulan hasil studi dalam menjabarkan gagasan-gagasan untuk penyempurnaan unsur-unsur sistem pengendalian manajemen pada KKI dan unit operasional.

c) Menganalisis dan mempelajari serta menyusun program-program kerja objek pemeriksaan dalam buku-buku praktis.

d) Menghitung dan menganalisis pemecahan masalah atas kegiatan pemeriksaan.

e) Mengajukan draft hasil evaluasi atau studi rencana pelatihan dan pengembangan staf pada KKI.

f) Mengadakan studi terhadap teknologi audit untuk bahan perbaikan sistem pemeriksaan manajemen

(5) Administrator Pemeriksa Madya

Tugasnya :

a) Merumuskan rencana pengembangan sistem kearsipan dokumen-dokumen pendukung pemeriksaan sesuai dengan kaidah pengelolaan administrasi organisasi pengawasan.

b) Merumuskan rencana pengembangan sistem pemantauan dan pemeriksaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

c) Melakukan evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

d) Melakukan koordinasi dalam penyusunan laporan evaluasi tindak lanjut triwulanan yang akan dikirim ke General Manager.

(6) Administrator Pemeriksaan Pertama

Tugasnya :

a) Melakukan pemantauan dan pemeriksaan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta mengadministrasikan tanggapan tindak lanjut obyek.

b) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan tindak lanjut temuan pemeriksaan bersama koordinator tindak lanjut masing-masing obyek pemeriksaan.

c) Melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan triwulanan hasil pelaksanaan pengawasan.

d) Menyiapkan draft laporan evaluasi tindak lanjut triwulanan laporan pelaksanaan pengawasan kinerja KKI serta perkembangan quality objective.

(7) Analisis

Tugasnya :

a) Melakukan analisis terhadap perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada masing-masing objek pemeriksaan.

b) Mengidentifikasi data-data Laporan Evaluasi Tindak Lanjut (LETL) hasil pelaksanaan pengawasan dan kinerja KKI sebagai bahan laporan triwulanan.

c) Menyusun data-data kegiatan administrasi hasil pemeriksa sebagai bahan pembuatan draft laporan bulanan.

d) Menyusun data-data laporan tahunan perkembangan dan kondisi KKI, laporan kinerja KKI dan laporan triwulanan perkembangan quality objective KKI.

(8) Kepala Bagian Pengawasan Keuangan

Tugasnya :

a) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penyusunan quality objective Bagian Pengawasan Keuangan.

b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan khusus kepada cabang perusahaan agar berjalan sesuai dengan sasaran dan jadwal yang sudah di tetapkan.

c) Mengkoordinasikan dan mereview rencana pemeriksaan, program kerja pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

d) Mengkoordinasikan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan pejabat obyek yang diperiksa.

(9) Pemeriksa Madya

Tugasnya :

a) Merumuskan dan merencanakan pemeriksaan keuangan serta pemeriksaan khusus kepada cabang perusahaan melalui pengumpulan informasi pendahuluan terhadap objek pemeriksaan yang sudah ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

b) Melakukan perumusan pertanyaan serta melaksanakan wawancara dan analisis pendahuluan terhadap objek pemeriksaan bersama-sama dengan pemeriksa dan atau pemeriksa pertama.

c) Melakukan kerjasama tim yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan sasaran dan jadwal yang sudah ditetapkan.

(10) Pemeriksa Pertama

Tugasnya :

a) Melakukan evaluasi pendahuluan melalui pendahuluan informasi mengenai obyek yang akan diperiksa.

b) Menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan rencana pemeriksaan dan program kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan efektif dan efisien.

c) Menetapkan analisis terhadap data-data yang diperoleh dalam pemeriksaan sesuai dengan langkah-langkah pada program kerja yang telah ditetapkan dan memberikan kesimpulan objective.

(11) Kepala Bagian Pengawasan Operasional

Tugasnya :

a) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan kegiatan penyusunan quality objective Bagian Pengawasan Operasional.

b) Mereview dan merekomendasikan rencana pemeriksaan, program kerja pemeriksaan, kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

c) Mengkoordinasikan pembahasan temuan hasil pemeriksaan dengan pejabat yang diperiksa.

3.1.2. Tinjauan Khusus Perusahaan

3.1.2.1. Aktivitas Perusahaan

Pada saat ini Perusahaan Listrik Negara masih merupakan BUMN tetapi sudah berbentuk Unit Bisnis namun sebagian besar saham perusahaan masih dikuasai oleh Pemerintah. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1994 PT Perusahaan Listrik Negara mempunyai maksud dan tujuan pokok yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan Penyediaan tenaga listrik dengan jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :
    a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
    b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan maksud dan tujuan tersebut PT Perusahaan Listrik Negara mengemban misi :

1. Fungsi Bisnis / Memupuk Keuntungan.

Sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan kaidah bisnis yang sehat guna menjamin keberadaan dan pengembangannya dalam jangka panjang.

2. Fungsi Sosial / Agen Pembangunan.

   Sebagai pelaksana pembangunan, melakukan kegiatan baik yang bersifat program pembangunan sebagaimana layaknya, maupun yang bersifat sosial dan perintis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sekalipun kegiatan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.

PLN Unit Bisnis Distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkitan dan transmisi. Unit ini "membeli" energinya dari unit PLN lainnya, yang diterima diout going Gardu Induk (GI). Seluruh Pulau Jawa menyerap hampir 80 % volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh 4 PLN Unit Bisnis Distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu Unit Bisnis Distribusi tersebut adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang, dengan luas daerah 42.404,36 km2 dan terdiri dari 23 pemerintah Daerah Tingkat II yang

Meliputi 6.353 desa dengan jumlah penduduk mencapai 32.644.614 jiwa.

Pada tahun 2001 ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat harus mencapai target penjualan energi sebesar 21.730,93GWh, dengan demikian PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat harus menambah pelanggan sekitar 450.000 pelanggan, dengan kVA tersambung 580,42 kVA dan menekan susut distribusi menjadi 8,7 %.

Dengan beban yang semakin berat setiap tahunnya untuk mencapai target yang telah di canangkan, maka PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat Perlu memperhatikan beberapa strategi yang bisa ditempuh, antara lain :

- Mengutamakan dan memberi prioritas pelaksanaan investasi bagi daerah atau pelanggan berpotensi menghasilkan kWh yang maksimal serta berprospek tinggi dengan memperhatikan aspek tekno ekonomis.
- PLN agar mempercepat realisasi penyambungan terhadap pelanggan komersil dan sudah masuk dalam daftar tunggu yang sudah bayar BP.

- Untuk menekan losses akan menggunakan trafo kapasitas kecil serta jarak pelayanan yang relatif pendek dan untuk penggunaan trafo satu fasa, agar telah dipasang satu fasa dan sedapat mungkin tidak dimodifikasi menjadi tiga fasa.
- Menggalakan OPAL tehadap pelanggan besar dengan persiapan yang matang dan peralatan yang lengkap untuk pembuktian.
- Mengadakan operasi terhadap penunggak listrik (FOCUS).

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang sesuai dengan maksud penelitian, sehingga dari data yang dikumpulkan dapat dilakukan analisis dan simpulan. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi kasus pada PT Perusahaan Lisrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Cikapundung Barat No. 2 Bandung. Pemilihan Perusahaan dilakukan secara sengaja (purposive) denga pertimbangan bahwa PT Perusahaan Listrik Negara merupakan perusahaan milik negara yang sudah menjadi Unit Bisnis.

(3) Dokumentasi

Dokumen yang diberikan, prosedur perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

(4) Kuesioner

Dengan memberikan angket pertanyaan tertulis kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dan responden hanya menjawab Ya dan Tidak didalam angket pertanyaan tersebut.

3.2.4. Teknik Penganalisaan Data

Teknik penganalisaan data yang dilakukan menggunakan tekhnik analisis komparasi kualitatif yaitu membandingkan antara kriteria dengan kondisis yang ada diperusahaan, sehingga dapat melihat lebih tajam kelemahan dan kekuatan dari masing-masing pendapat. Penulis tetap bersikap objektif dalam melakukan penilaian terhadap kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas yang dilakukan Kesatuan Kontrol Intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dengan melihat pada kriteria maupun standar yang lazim dipakai secara umum diperusahaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kegiatan Pemeriksaan Intern dan Pelaksanaan Pemeriksaan Intern atas Pengendalian Kas Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat

4.1.1. Kegiatan Pemeriksaan Intern Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat

Kegiatan pemeriksaan intern merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Seluruh kegiatan ini memiliki hubungan satu sama lainnya dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas pemeriksaan intern secara terpadu.

4.1.1.1. Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan merupakan suatu proses yang mencakup penentuan terlebih dahulu bidang-bidang kerja yang akan dicakup dalam pemeriksaan, kebutuhan tenaga pemeriksa, prosedur yang akan dipakai dan sistematika pelaksanaan pemeriksaan.

Tanpa adanya rencana kerja akan timbul kecenderungan untuk menghindari atau menunda penugasan atau sebaliknya

menunggu penugasan baru sehingga waktu tersita tanpa hasil. Oleh karena itu pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan selalu mengacu pada misi perusahaan.

Rencana pemeriksaan KKI pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) perencanaan, yaitu :

1) Rencana Pemeriksaan Jangka Panjang

Rencana pemeriksaan jangka panjang KKI berisi pokok-pokok arah (strategi) dan peranan KKI di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan KKI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan rencana jangka panjang dan misi perusahaan.

Rencana pemeriksaan jangka panjang yang terdapat pada Kesatuan Kontrol Intern di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

(a) Sebagai Penuntun

Rencana pemeriksaan jangka panjang yang disusun oleh KKI pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat adalah sebagai landasan bagi penyusunan rencana pemeriksaan jangka pendek sehingga rencana jangka panjang mempermudah pendelegasian pekerjaan pada staf pemeriksa dan

memberikan pedoman mengenai apa yang harus dikerjakan dari waktu ke waktu pada KKI di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

(b) *Sebagai Dasar Penyusunan Anggaran*

Rencana pemeriksaan jangka panjang KKI pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat menguraikan secara terperinci mengenai pemeriksaan yang akan dijalankan. Setiap tugas yang dicantumkan menunjukkan sifat pemeriksaan dan perkiraan waktu yang diperlukan. Rencana yang telah disetujui pimpinan dapat diajukan sebagai dasar untuk pengajuan tenaga pemeriksa yang dibutuhkan, waktu yang diperlukan, dan sebagainya yang selanjutnya digunakan untuk menghitung kebutuhan biaya perjalanan dinas dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan oleh KKI di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

(c) *Sebagai Alat Untuk Memeperoleh Partisipasi Manajemen*

Seluruh rencana pemeriksaan jangka panjang yang terdapat di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yang telah ditentukan oleh pihak KKI PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit

Bisnis Distribusi Jawa Barat direview bersama-sama dengan General Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat. Dengan demikian General Manager terkait pada program pemeriksaan yang telah disetujuinya dan dia akan mengizinkan pemeriksa untuk memasuki daerah kekuasaannya atau organisasi yang dikendalikan dalam rangka pemeriksaan intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

(d) Sebagai Alat Penetapan Standar

Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat rencana pemeriksaan jangka panjang merupakan alat pengukur atas keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan. Perbandingan antara jumlah hari pemeriksaan yang direncanakan dengan yang sebenarnya dapat menunjukan tingkat keberhasilan pemeriksaan intern PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat. Jika ada perbedaan yang mencolok maka dapat dilakukan analisis dan digunakan sebagai alat penyusunan rencana pemeriksaan berikutnya yang lebih baik.

(e) Sebagai Alat Pengendalian

3.2.2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku-buku acuan dan sumber-sumber lainnya diperpustakaan.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Yaitu diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dengan cara:

(1) Teknik wawancara

Menggunakan pertanyaan dan diskusi langsung yang berhubungan dengan topik yang dibahas pada skripsi ini.

(2) Teknik observasi

Pengamatan langsung pada bagian Kesatuan kontrol Intern untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya dari aktivitas yang dilakukan.

Rencana pemeriksaan jangka panjang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat merupakan pedoman untuk mengarahkan kegiatan pemeriksaan pada tujuan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Rencana pemeriksaan yang disusun dengan baik merupakan tolak ukur bagi manajemen untuk mengendalikan kegiatan pemeriksaan.

(f) *Sebagai Pedoman Bagi Pemeriksaan Ekstern*

Pemeriksaan ekstern dapat menetapkan luas pengujian pemeriksaannya dengan cara menilai sistem pengendalian manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yang diperiksanya. Pemeriksaan intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat merupakan salah satu unsur pengendalian manajemen. Salah satu gambaran mengenai pemeriksaan intern yang dikelola dengan baik adalah adanya rencana pemeriksaan dari pemeriksa intern yang dipersiapkan dan disusun dengan baik. Rencana pemeriksaan tersebut dapat dijadikan dasar bagi pemeriksa ekstern untuk memperluas pemeriksaan terhadap bagian-bagian lain yang belum tercakup dalam rencana pemeriksaan tersebut.

2) Rencana Pemeriksaan Jangka Pendek

Untuk mencapai rencana pemeriksaan jangka panjang KKI, harus dituangkan dalam rencana pemeriksaan jangka pendek (tahunan) yang umumnya dalam istilah pemeriksaan tersebut dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT memuat antara lain ; pemilihan obyek pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, tim pemeriksa, dan rencana waktu pemeriksaan.

(a) Pemilihan obyek pemeriksaan

Program kerja pengawasan tahunan merupakan rencana pemeriksaan terhadap obyek yang disiapkan berdasarkan kepentingan dan kebijakan perusahaan untuk tahun anggaran tertentu yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Tingkat materialitas suatu transaksi
- Penilaian resiko dan sensitivitas
- Keterikatan dengan Strategi perusahaan
- Keterikatan dengan unit operasional
- Adanya permintaan manajemen
- Periode pemeriksaan terakhir
- Pemeriksaan oleh pemeriksa intern
- Kemampuan KKI

(b) Tujuan pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan dapat dikelompokan menjadi dua kelompok, yaitu pemeriksaan kas dan pemeriksaan operasional. Tujuan pemeriksaan kas yaitu ketaatan dan keabsahan, sedangkan tujuan operasional yaitu peningkatan efektifitas, efisiensi dan peningkatan ekonomi.

(c) Ruang lingkup pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan keuangan meliputi semua pos-pos neraca, pos-pos laba rugi serta pos-pos lainya seperti pendapatan lain-lain, biaya lain-lain, guna diperiksa kewajaran penyajiannya. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan operasional meliputi semua aspek manajemen yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penangannya oleh manajemen atas kegiatan-kegiatan atau program yang diperiksa.

(d) Tim pemeriksa

Dalam perencanaan pemeriksaan harus ditentukan jumlah tenaga pemeriksa yang diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan anggaran waktu yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi pemeriksaan terdiri dari :

- Penanggung jawab
- Pengawas
- Ketua tim
- Anggota tim

(e) Rencana waktu pemeriksaan

Dalam perencanaan pemeriksaan harus ditetapkan taksiran waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu taksiran waktu untuk :

- Pemeriksaan lapangan
- Penyelesaian laporan
- Penerbitan laporan

3) Rencana Kerja Pemeriksaan Terhadap Obyek

Rencana pemeriksaan merupakan rincian rencana pelaksanaan pemeriksaan untuk setiap obyek yang terdapat dalam program kerja pengawasan tahunan. Rencana pemeriksaan ini mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi para pemeriksa mengenai arah, ruang lingkup, lokasi pemeriksaan dan skedul pemeriksaan yang harus dilakukan. Rencana pemeriksaan mempunyai struktur isi sebagai berikut :

- Tujuan pemeriksaan
- Sasaran pemeriksaan
- Ruang lingkup pemeriksaan

- Tim pemeriksa
- Waktu pelaksanaan pemeriksaan
- Rencana penerbitan laporan

Dalam hal penyusunan PKPT mengenai obyek pemeriksaan terdapat struktur isi di atas. Mengenai obyek pemeriksaan yang potensial yang memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat agar menyusun juga skala prioritas pemeriksaan terhadap obyek-obyek pemeriksaan yang potensial, dimana hal tersebut agar memudahkan dan membantu pemeriksa untuk melakukan pengawasan terhadap obyek-obyek pemeriksaan.

4.1.1.2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu :

I) **Persiapan Pemeriksaan**

Dalam melakukan persiapan pemeriksaan tercakup hal-hal sebagai berikut :

(1) Surat Tugas

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan harus didasarkan surat tugas pemeriksaan yang disiapkan dan diparaf oleh Kepala Bagian Pengawasan dan ditandatangani oleh Kepala KKI.

(2) Pengumpulan Informasi

Sesuai surat tugas pemeriksaan dari kepala KKI, mengumpulkan informasi mengenai obyek yang akan diperiksa, seperti ; sistem dan prosedur, laporan-laporan, peraturan, kertas kerja pemeriksaan, dan lain-lain. Dalam hal ini terutama sekali mencari informasi sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari :

- Organisasi obyek yang diperiksa
- Kebijakan yang berhubungan dengan auditee
- Perencanaan yang dirancang oleh auditee
- Pencatatan yang dilakukan oleh auditee
- Sistem dan prosedur yang dipakai oleh auditee
- Personalia yang digunakan oleh auditee
- Standar yang dipakai oleh auditee
- Laporan yang dipakai oleh auditee

(3) Rencana Pemeriksaan dan Program Pemeriksaan

Setelah informasi terkumpul, kemudian menyiapkan Rencana Kerja Persiapan Pemeriksaan (RKP) dan Program Kerja Persiapan Pemeriksaan (PKPP). RKP dan PKPP kemudian direview oleh pengawas dan penanggung jawab (Kepala KKI).

(4) Menyusun Daftar Pertanyaan

Setelah RKP dan PKPP selesai, selanjutnya menyiapkan daftar pertanyaan.

(5) Memo Dinas

Setelah daftar pertanyaan selesai, disampaikan kepada pengawas untuk penyiapan Memo Dinas Pemeriksaan. Selanjutnya Memo Dinas Pemeriksaan yang berfungsi sebagai sarana pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa KKI, dikirim oleh Administrasi kepada Manajer obyek yang bersangkutan dengan tembusan kepada :

- Deputi Manajer atau Kepala Bagian unit terkait
- Koordinator tindak lanjut bidang yang bersangkutan dan unit terkait
- Tim pemeriksa
- Arsip Kepala KKI

II) Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, hal-hal yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

(1) Wawancara dan Survey Pendahuluan

Melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan dan pengembangannya dengan memperhatikan tingkat pejabat yang diwawancarai, kemudian melakukan survey pendahuluan terhadap fisik lapangan.

(2) Program Kerja Pemeriksaan Pendahuluan

Setelah selesai melakukan wawancara dan survey pendahuluan, ketua tim menyiapkan program kerja pemeriksaan pendahuluan berdasarkan hasil wawancara dan survey pendahuluan.

(3) Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan

Anggota tim melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan mengacu pada program kerja yang telah disiapkan.

(4) Kesimpulan atau Ikhtisar Pemeriksaan Pendahuluan

Setelah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan, menyiapkan kesimpulan atau ikhtisar hasil pemeriksaan pendahuluan kemudian Ketua Tim

mereview kesimpulan atau ikhtisar hasil pemeriksaan pendahuluan.

Oleh karena pemeriksaan intern dilaksanakan pihak intern, maka pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan tidak dilakukan secara mendalam, dikarenakan tim pemeriksa selalu mengikuti perkembangan aktivitas obyek pemeriksaan sehingga telah mengetahui perusahaan secara lebih dekat, dibanding jika pihak ekstern yang melaksanakan pemeriksaan. Jadi dalam hal ini tim pemeriksa hanya hanya melakukan tinjauan ulang terhadap obyek yang akan diperiksa.

III) Pemeriksaan Lanjutan

Dalam tahap ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

(1) Program Kerja Pemeriksaan Lanjutan

Ketua tim menyiapkan program kerja pemeriksaan lanjutan sesuai dengan kondisi-kondisi yang ditemukan pada pemeriksaan pendahuluan.

(2) Pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan

Setelah selesai menyiapkan program kerja pemeriksaan lanjutan, melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan program kerja yang telah disusun dan dibahas setiap temuan dengan obyek pemeriksaan. Bila terdapat permasalahan yang

menghambat kelancaran pemeriksaan, maka segera menginformasikan kepada pengawas untuk ditanggulangi.

(3) Kesimpulan atau ikhtisar

Anggota tim menyiapkan kesimpulan atau ikhtisar hasil pemeriksaan lanjutan, dan konsep temuan (LOR sheet) diparaf kemudian kemudian dibahas dengan obyek pemeriksaan.

(4) Temuan Hasil Pemeriksaan atau LOR Sheet

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam temuan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a) Kondisi

Kondisi adalah kenyataan yang ada di lapangan yang ditemukan pada suatu proses pemeriksaan. Kondisi yang ditemukan tersebut bisa negatif atau positif.

b) Kriteria

Kriteria adalah sesuatu yang seharusnya atau yang layak dikerjakan oleh unit operasional, biasanya berupa prosedur kerja, standar kerja, peraturan pemeriksaan, atau yang berupa rumusan teoritis yang secara umum dapat dibenarkan.

c) Sebab

Sebab adalah suatu yang mengakibatkan adanya penyimpangan kondisi dan kriteria yang seharusnya dikerjakan. Sebab ini harus dicari yang paling mendasar, sebagai dasar untuk melakukan rekomendasi.

d) Akibat

Akibat adalah suatu kenyataan atau yang akan terjadi atau diderita oleh perusahaan karena adanya penyimpangan.

Akibat ini bisa berupa positif atau negatif.

e) Tanggapan Auditee

Tanggapan auditee adalah tanggapan yang diberikan oleh auditee (obyek yang diperiksa) atas kondisi, kriteria, sebab, akibat yang ditemukan oleh tim pemeriksa baik berupa dukungan atau bantahan. Tujuan dari tanggapan obyek yang diperiksa untuk mencari obyektivitas temuan tim pemeriksa.

f) Rekomendasi

Rekomendasi adalah saran yang harus dilaksanakan oleh auditee. Rekomendasi ini terdiri dari :

- Menghilangkan penyebab yang paling mendasar
- Melaksanakan kriteria kembali
- Tindakan hukuman
- Dan lain-lain.

(5) Konsep laporan Hasil Pemeriksaan

Ketua tim menyiapkan konsep LHP sesuai dengan hasil pemeriksaan serta menyampaikan kepada pengawas untuk direview.

IV) Finalisasi Hasil Pemeriksaan

Dalam tahap ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

(1) Pembahasan LHP Dengan Obyek

Tim pemeriksa bersama obyek pemeriksaan dan unit lain yang terkait menetapkan jadual pembahasan LHP. Sebelum konsep LHP dibahas dengan obyek pemeriksaan atau unit lain yang terkait, harus terlebih dahulu direview oleh pengawas pemeriksaan yang disertai dengan pemberian komentar-komentar atau saran-saran perbaikan pada formulir review. Untuk menyamakan persepsi mengenai temuan-temuan dan saran atau rekomendasi, Administrator Pemeriksa Madya harus mengikuti rapat pembahasan

konsep LHP antara tim pemeriksa dengan obyek pemeriksaan.

(2) Finalisasi LHP

Administrator pemeriksa menerima LHP kemudian diperbanyak sesuai kebutuhan mendistribusikannya kepada :

- General Manager (asli)
- Manajer obyek pemeriksaan
- Manajer unit lain yang terkait
- Deputi Manajer obyek pemeriksaan
- Koordinator Tindak Lanjut Bidang yang terkait.
- Arsip.

Pelaksanaan pemeriksaan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat secara garis besar dapat dilihat pada tabel I.

TABEL I
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

IKELUARKAN OLEH	PROSEDUR PEMERIKSAAN KKI	REF. NO : INA/3/OA/002		
		HAL : 8 DARI 30		
		TANGGAL DIKELUARKAN		
KKI	II. KEBIJAKSANAAN	10	4	1998

NO	KEGIATAN	AT	KT	PGS	KA.KKI	ADM
I	PERSIAPAN PEMERIKSAAN					
	1. Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan	-	-	-	O,T	D
	2. Penyusunan Rencana Pemeriksaan dan Program Kerja Persiapan Pemeriksaan	-	O,P	R,P	R	-
	3. Pengumpulan Informasi tentang obyek	O	-	-	-	O
	4. Penyusunan Daftar Pertanyaan	O	R,P	R	-	-
	5. Pembuatan Memo Dinas	-	-	O,P	T	D
II	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN					
	1. Wawancara dan Survey Pendahuluan	O	O	O	-	-
	2. Penyusunan Program Pemeriksaan Pendahuluan	-	O,P	R,P	-	-
	3. Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan	O	O,R	R	-	-
	4. Penyusunan KKP, Kesimpulan/Ikhtisar Pendahuluan	O	R,P	R,P	-	-
	5. Persentasi Pendahuluan	H	H	O	R	-
III	PEMERIKSAAN LANJUTAN					
	1. Penyusunan Program Pemeriksaan Lanjutan	-	O,P	R,P	-	-
	2. Pelaksanaan Pemeriksaan lanjutan	O	O,R	R	-	-
	3. Penyusunan KKP, Kesimpulan/Ikhtisar Lanjutan	O	R,P	R,P	-	-
	4. Penyusunan Konsep Temuan/LOR Sheet	O	R,P	R,P	-	-
	5. Persentasi Lanjutan	H	H	O	R	-
IV	FINANSIAL HASIL PEMERIKSAAN					
	1. Penyusunan Konsep LHP	-	O	R	-	-
	2. Pembahasan dengan Obyek Pemeriksaan	O	O	O	-	-
	3. Penyusunan Notulen Rapat Konsep LHP	O,D	R,T	T	-	-
	4. Finansial LHP	-	O	R,P	R,T	D
	5. Penyusunan Eksekutif Summary	-	-	O	R,T	D
V	PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT					
	1. Pemeriksaan/Pembahasan Tindak Lanjut	-	O	O	-	-
	2. Penetapan Status Tindak Lanjut	-	-	O,T	-	-
	3. Penyusunan laporan Tindak Lanjut	-	-	-	R,T	O,D
VI	RAPAT KOORDINASI DUA MINGGUAN	O	O	O	-	-

KETERANGAN : O = Melaksanakan kegiatan ; R = Proses Review ; P = Paraf ; T = Tanda tangan ; D = Distribusi ; H = Hadir ; AT = Anggota Tim ; KT = Ketua Tim ; PGS = Pengawas ; ADM = Administrasi

4.1.1.3. Pelaporan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan

Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut merupakan sarana komunikasi resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada manajemen, atau pejabat yang perlu mengetahui informasi tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan kesempatan bagi pemeriksa untuk menarik perhatian manajemen, yaitu untuk memperlihatkan kepada manajemen hal-hal yang harus dilakukan manajemen guna memajukan perusahaan.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam penyusunan LHP yaitu :

1) Cermat

   LHP secara keseluruhan harus berdasarkan fakta. Setiap pernyataan, angka dan referensi harus didasarkan atas bukti-bukti yang kuat.

2) Jelas

   Harus dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penulisan LHP, seperti :

- Pemeriksa tidak memahami pokok masalah yang dilaporkannya
- LHP ditulis secara bertele-tele
- Susunan pengungkapan kalimat yang tidak baik dalam LHP
- Banyak menggunakan istilah-istilah teknis dan istilah khusus yang kurang lazim
- Temuan-temuan dilaporkan tanpa diuraikan latar belakangnya, dan sebagainya.

3) Ringkas

LHP harus ringkas untuk menghilangkan apa yang tidak relevan dan tidak material.

4) Tepat waktu

LHP dimaksud untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi yang mutakhir, disamping itu LHP resmi dibuat untuk meminta dilakukannya sesuatu tindakan atau perbaikan manajemen. Tujuan tersebut akan tercapai jika LHP dapat diterbitkan atau disampaikan kepada manajemen tepat pada waktunya.

5) Nada

LHP harus memiliki nada yang tepat, harus sopan dan mempertimbangkan pengaruhnya atas para pegawai operasi tingkat bawahan.

Dalam menyusun LHP pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yaitu berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. LHP ini ditandatangani oleh Kepala KKI yang kemudian disampaikan kepada General Manager dengan tembusan sebagai berikut :

- Manajer obyek pemeriksaan
- Manajer unit lain yang terkait
- Deputi Manajer obyek pemeriksaan
- Koordinator tindak Lanjut Bidang yang terkait.

Bentuk laporan hasil pemeriksaan pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sudah cukup dan sesuai dengan susunan laporan hasil pemeriksaan secara umum yang memuat :

(a) Tujuan atau sasaran pemeriksaan.

(b) Ruang lingkup tugas pemeriksaan.

(c) Temuan hasil pemeriksaan.

(d) Tanggapan obyek atau penyempurnaan yang konstruktif.

Selain menyususn laporan hasil pemeriksaan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat juga memuat laporan triwulanan hasil

pelaksanaan pengawasan yang ditandatangani oleh General Manager dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan BUMN atau BUMD BPKP dengan tembusan kepada Deputi Ekonomi dan Keuangan BPIS dan Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta. Kemudian dibuat laporan tahunan yang memuat perkembangan kondisi KKI untuk ditandatangani oleh General Manager dan disampaikan kepada Deputi Bidang Pengawasan BUMN atau BUMD BPKP.

Bentuk susunan LHP yang digunakan oleh KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yaitu terdiri dari 2 (dua) bentuk laporan antara lain:

1) Susunan LHP dalam bentuk BAB.

   Bentuk Bab adalah bentuk laporan yang membagi penyajian LHP dalam beberapa bab. Bentuk bab ini digunakan dalam hal :

   - Informasi yang dimuat cukup banyak sehingga dikehendaki penataan yang lebih sistematis.
   - Dikehendaki agar tampil lebih formal.

2) Susunan LHP dalam bentuk surat

   Bentuk surat biasanya dipakai apabila informasi yang hendak diperoleh relatif lebih singkat atau harus

disampaikan dengan segera atau apabila ada alasan lainnya

yang menghendaki bentuk demikian. Ketentuan mengenai LHP bentuk surat adalah :

(a) Halaman laporan hasil pemeriksaan

- Halaman pertama menggunakan kop surat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat (standar)
- Halaman selanjutnya menggunakan kertas HVS polos
- Nomor halaman diletakkan di bagian tengah bawah dengan angka biasa.

(b) Halaman lampiran

- Halaman lampiran dibuat dengan nomor halaman terpisah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan oleh obyek yang diperiksa atau unit terkait sesuai dengan rekomendasi yang telah dikemukakan Tim Pemeriksa dalam LHP. KKI harus mengakui tindak lanjut dari Manajer atau Deputi Manajer obyek pemeriksaan unit yang terkait atas saran atau rekomendasi yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan.

Pemeriksaan harus terbuka, apabila pihak obyek yang diperiksa atau unit yang terkait ingin mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang akan mereka lakukan atau dalam menyusun tanggapan-tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan.

Kepala KKI harus menerbitkan Laporan Evaluasi Tindak Lanjut (LETL) triwulanan pada setiap tahun pemeriksaan, dimana berisi antara lain :

1) Obyek pemeriksaan.
2) Saran atau rekomendasi KKI.
3) Status tindak lanjut (selesai, dalam proses dan belum dilaksanakan).
4) Prosentase status tindak lanjut setiap objek pemeriksaan dan total perusahaan dan grafiknya.
5) Prosentase keterlambatan tindak lanjut.
6) Permasalahan dan analisis.
7) Kesimpulan dan saran.

Hampir seluruh rekomendasi yang diberikan ditindak lanjuti, kecuali terjadi perubahan metode, teknologi, sistem dan prosedur, sehingga apabila rekomendasi dilaksanakan akan tidak bermanfaat.

Biasanya pelaksanaan tindak lanjut tersebut berupaya untuk :

(a) Menghilangkan sebab.
(b) Melaksanakan kembali kriteria.

(c) Membuat sistem, prosedur dan standar baru.

4.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan Intern atas Pengendalian Kas Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas dilakukan KKI dengan menguji pengendalian intern terhadap kas melalui kuesioner pengendalian intern untuk menilai apakah kebijakan-kebijakan pengendalian kas telah ditaati. Pelaksanaan pemeriksaan kas mengacu pada program pemeriksaan kas yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan. KKI juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan yang bertujuan mendapatkan temuan-temuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada agar dapat dirumuskan rekomendasi yang diperlukan sebagai dasar penyusunan pendapat dan kesimpulan.

4.2.1.1. Kebijakan Pengendalian Kas

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dalam melaksanakan pengendalian kas memiliki kebijakan-kebijakan diantaranya :

A) Kebijakan Umum

1) Proses pembayaran baru dapat dilaksanakan apabila semua dokumen yang mendukung proses pembayaran

telah diverifikasi dan dilampiri dengan dokumen voucher (perintah pembayaran).

2) Proses pembayaran sah, apabila telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan surat keputusan kebijakan otorisasi penandatanganan dokumen pembayaran.

3) Pembayaran dilakukan dalam dua bentuk yaitu :

- Untuk pembayaran diatas Rp. 5.000.000.- digunakan cek atau giro atau transfer langsung kerekening.
- Untuk pembayaran dibawah Rp. 5.000.000,- dibayar langsung melalui petty cash (uang tunai).

4) Pencatatan pembayaran menggunakan media cash Disbursement Voucher.

B) Kebijakan Khusus (Otorisasi)

Pejabat-pejabat yang berwenang menyetujui (opproval) tagihan-tagihan adalah sebagai berikut :

a. Untuk penandatanganan cek atau giro dan perintah transfer sampai dengan jumlah Rp. 750.000,- dilakukan oleh Deputi Manajer atau kepala bagian atau salah satu pejabat yang langsung diatasnya pada bagian keuangan.

b. Untuk Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 200.000.000,- dilakukan oleh Manajer Keuangan.

c. Untuk diatas Rp. 200.000.000,- dilakukan oleh General Manager.

C) Kebijakan Penerimaan Pembayaran Rekening Listrik

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam melakukan penerimaan pembayaran rekening listrik bekerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD), hal ini sesuai dengan Surat Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 755/KPTS/PERTAMB/1979 dan No. 613/KDP/K/1979 tentang pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Usaha Koperasi Unit Desa di bidang kelistrikan, serta Naskah Kerjasama antara PLN dengan Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi No. 001. NK/050/1990/M dan No. 20/SKB//BUK/I/1990 dalam Pembinaan dan Pengembangan Usaha KUD khususnya di Bidang Listrik Pedesaan. Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan listrik dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Kerjasama dalam hal penerimaan pembayaran rekening listrik bulanan untuk bulan berjalan.

1. Melaksanakan penerimaan pembayaran rekening listrik dengan tertib, baik dan benar setiap hari selama masa

periode penjualan rekening sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pehak PLN.

Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur, maka batas akhir penerimaan penjualan rekening listrik diundur pada hari kerja berikutnya.

2. Menyetorkan semua hasil penerimaan pembayaran rekening dari pelanggan setiap hari kepada Bank yang telah ditunjuk, dengan benar dan dengan keamanan yang terjamin serta melaporkan bukti penyetoran tersebut kepada pihak PLN.

   Apabila terjadi keterlambatan penyetoran uang, maka pihak Koperasi bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak PLN dengan rumusan perhitungan :

$$\frac{\text{Jml uang yg terlambat disetor x Hari keterlamba tan x Suku bunga deposito BRI 3 b ln}}{\text{360 hari}}$$

Kebijakan-kebijakan tersebut diatas harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh manajenen guna melakukan pengendalian terhadap kas. Mengingat kas merupakan modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya sehingga sangat mudah untuk diselewengkan, maka sangat diperlukan suatu pengendalian kas yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pelaksanaan

pemeriksaan intern sebagai alat kontrol untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut serta menilai sejauh mana manajemen melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Maka dari itu pelaksanaan pemeriksaan intern sangat diperlukan guna memperbaiki kekurangan pada obyek atau kelemahan yang ada pada objek yang diperiksa.

4.2.1.2. Tujuan Pemeriksaan Kas

Pelaksanaan pemeriksaan kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat mengacu pada program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan, di mana tujuan dari program kerja pemeriksaan kas dikelompokkan menjadi dua yaitu tujuan pemeriksaan kas pendahuluan dan pemeriksaan kas lanjutan.

Tujuan dari program pemeriksaan pendahuluan terhadap kas adalah sebagai berikut :

1) Untuk memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan.
2) Untuk menentukan sah atau tidaknya transaksi kas.
3) Untuk menilai ketepatan jumlah dan penyajian saldo kas dalam neraca.

4) Untuk menyakinkan bahwa saldo kas pada tanggal neraca benar-benar milik perusahaan.

Tujuan dari program pemeriksaan lanjutan terhadap kas adalah untuk :

1) Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan kas.
2) Membuktikan eksistensi kas yang dicantumkan dalam neraca.
3) Membuktikan ketepatan pisah batas (cut off) transaksi kas.
4) Membuktikan kewajaran penyajian kas didalam neraca.
5) Membuktikan kemungkinan terjadinya penggelapan terhadap kas.

4.2.1.3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kas

Pelaksanaan pemeriksaan intern sangat diperlukan guna memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang ada pada objek yang diperiksa, dalam hal ini objek yang diperiksa adalah kas. Mengingat kas merupakan unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya sehingga sangat mudah untuk diselewengkan, maka sangat diperlukan suatu pengendalian kas yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pelaksanaan pemeriksaan intern sebagai alat kontrol untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut serta menilai sejauh mana

manajemen melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pelaksanaan pengujian pengendalian intern terhadap kas dilakukan dengan cara kuesioner pengendalian intern (Internal Control Quetionnaries) sebagai berikut :

TABEL II

INTERNAL CONTROL QUESTIONNARIES

NO	PERTANYAAN PENERIMAAN KAS	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Apakah digunakan kuitansi khusus perusahaan? Bila Ya, apakah : a. Bernomor urut cetak? b. Digunakan menurut urutan nomor urut? c. Bentuk pembayaran dinyatakan dalam kuitansi ? d. Buku kuitansi terregister? e. Buku kuitansi terkontrol dengan baik? f. Bagian akuntansi memperhatikan urutan-urutan nomor urut?	 V V V V V V		
2.	Apakah hasil penerimaan baik dari penjualan tunai maupun penagihan piutang disetorkan secara utuh ke bank paling lambat keesokan harinya?	V		
3.	Apakah penyetoran dilakukan oleh pegawai yang bukan pemegang buku piutang ?	V		
4.	Apakah bukti setoran dicocokkan dengan kuitansi oleh bagian kuitansi?	V		
5.	Apakah total yang tertera pada bukti setoran dicocokkan dengan transaksi debet pada buku bank yang bersangkutan ?	V		
6.	Apakah debet menu dari bank diterima langsung oleh pejabat tertentu untuk diinvestigasi?	V		
7.	Apakah tugas kasir terpisah dari pembukuan piutang?	V		
8.	Apakah tata administrasi diatur sedemikian rupa sehingga kasir atau orang-orang yang menyetor ke bank tidak mendapat kesempatan untuk mencatat atau merubah angka pada buku piutang dan daftar perhitungan saldo yang akan dikirimkan kepada langganan?	V		

9.	Bila perusahaan membina beberapa dana kas sesuai dengan sumber penggunaannya, apakah dana kas tersebut dan surat berharga secara phisik disimpan secara terpisah dan diadministrasikan masing-masing (tidak tercampur)?	V		
10.	Apakah pengamanan untuk menjaga uang kas cukup ?	V		
11.	Apakah penerimaan yang sifatnya rutin, misalnya sewa, deviden, bunga dan sebagainya secara berkala direview sehingga atas kekurangannya segera dibuatkan catatannya dan diinvestigasi?	V		
12.	Apakah kantor pusat mengontrol penerimaan cabang?	V		
13.	Apakah perusahaan menggunakan kas register dan pengendalian mekanis lainnya?	V		
14.	Apakah Apakah bukti-bukti penerimaan kas dibuat prenumbered?	V		
15.	tidak terdapat penerimaan cek dengan Apakah tanggal mundur?	V		
	PENGELUARAN KAS			
1.	Apakah ada ketentuan mengenai wewenang penandatanganan cek?	V		
2.	Apakah semua pembayaran kecuali untuk pengisian dana kas kecil dilakukan dengan cek?	V		Cek, giro dan transfer
3.	Apakah semua cek yang belum digunakan, disimpan oleh orang tertentu?	V		
4.	Apakah cek digunakan menurut nomor urut?	V		
5.	Apakah semua cek yang dibatalkan tetap melekat pada buku cek dan dirusak agar tidak disalah gunakan?	V		
6.	Apakah cek dilindungi terhadap pemalsuan tulisan?	V		
7.	Apakah untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil jumlahnya telah dibentuk sistem petty cash?	V		
8.	Apakah penandatanganan cek terpisah dari yang menyimpan uang kas dan pemegang buku?	V		
9.	Apakah setiap pembayaran didukung dengan bukti otentik yang telah diperiksa dan telah disetujui oleh orang lain yang menandatangani cek dan diparaf?	V		
10.	Apakah semua bukti segera distempel "LUNAS" untuk menghindari pembayaran dua kali?	V		
11.	Apakah orang yang menyiapkan cek terlepas			

	dari : a) Orang yang menandatangani cek? b) Pembayaran uang kas?	 V V		
12.	Apakah rekonsiliasi bank : a) Dibuat paling sedikit sebulan sekali? b) Direviw oleh pejabat senior?	 V V		
13.	Apakah rekening koran langsung dikirim oleh bank kepada orang yang membuat rekonsiliasi?	V		
14.	Apakah deposit in transit (penyetorang ke bank yang belum tampak di rekening koran) outstanding check, inter bank transfer diperhatikan dengan seksama pada saat rekonsiliasi?	V		
15.	Apakah kas kecil : a) Dibina dengan sistem imprest fund? b) Pengeluaran dibatasi dengan jumlah tertentu? c) Besarnya dana direviw secara periodik? e) Diawasi dengan cukup?	 V V V V		
16.	Apakah bukti pengeluaran kas kecil : a) Diperlukan untuk semua pembayaran? b) Ditandatangani oleh orang yang melakukan pembayaran? c) Ditandatangani oleh yang memeriksa pembayaran? d) Ditulis dengan tinta? e) Disetujui oleh pejabat yang berwenang?	 V V V V V		
17.	Apakah secara berkala dilakukan kas opname secara mendadak?	V		
18.	Apakah pengisian kembali kas kecil dilakukan : a) Dengan cek? b) Semuadokumen yang mendukung pembayaran diperiksa?	 V V		

Untuk melakukan pengujian terhadap *Internal Control Questionnaries*, KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat melakukan *Compliance test*. Tindakan yang diambil oleh tim pemeriksa adalah:

1) Bila jawaban pertanyaan adalah "YA" perlu diperiksa mengenai kelayakan atau kecukupan atau kelengkapan dokumen-dokumen yang dimaksud, yaitu:
   - Bila sudah layak atau cukup atau lengkap,dapat diteruskan kepemeriksaan berikutnya untuk menilai ketaatan pelaksanaannya.
   - Bila belum atau tidak layak atau belum lengkap, beri komentar untuk perbaikan.
2) Bila jawaban atas pertanyaan adalah "TIDAK" segera laporkan.

Berdasarkan hasil survei dan penelitian serta memperhatikan kebijakan-kebijakan terhadap kas yang ada diperusahaan, serta didukung oleh *Internal Control Questionnaries* yang diuji dengan cara *compliance test* untuk menilai ketaatan pelaksanaannya maka dengan demikian bahwa pemeriksaan intern atas pengendalian kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sudah cukup memadai.

Pelaksanaan pemeriksaan intern kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat mengacu pada program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Adapun langkah-langkah dari program kerja pemeriksaan terhadap kas adalah sebagai berikut :

1) Lakukan penutupan buku kas per tanggal pemeriksaan dan tentukan saldonya.

2) Adakan kas opname dan buat berita acaranya.

   Hitung seluruh uang tunai yang ada, cek, cash bond kertas berharga, perangko, materai tempel, bukti yang dibukukan dan surat berharga lainnya yang terdapat dalam brankas.

3) Untuk petty cash, lakukan petty cash opname secara serentak diseluruh lokasi.

4) Bandingkan saldo uang menurut cash opname dengan saldo buku.

5) Jika kas kecil menggunakan imprest fund, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dana tersebut sebelum diadakan pengisian kembali. Periksa apakah dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan tersebut sudah lengkap untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang.

6) Lakukan perhitungan mundur atas hasil kas opname ke saldo kas pada tanggal pemeriksaan dengan cara :

   (a) Tambahkan seluruh pengeluaran antara tanggal pemeriksaan sampai tanggal kas opname.

(b) Kurangkan seluruh penerimaan antara tanggal pemeriksaan sampai tanggal opname.

7) Bandingkan saldo kas pada point 5 dengan saldo kas perbuku pada tanggal pemeriksaan.

8) Tentukan penyebab terjadinya selisih kas tersebut.

9) Dapatkan daily cash receipt atau disbursement per periode pemeriksaan kemudian lakukan hal-hal sebagai berikut :

(a) Test kembali penjumlahannya (footing dan cross footing).

(b) Trace secara sample penerimaan kas dan pengeluaran kas ke bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas yaitu Cash Receipt atau cash disbursement (CR/CD).

(c) Periksa otorisasinya.

10) Lakukan trace atas bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas tersebut ke dokumen pendukungnya, kemudian :

(a) Teliti kelengkapan dokumen pendukungnya.

(b) Teliti keabsahan dokumen pendukungnya.

11) Dapatkan contoh tanda tangan (speciment) pejabat-pejabat yang berwenang, bandingkan dengan tanda tangan yang terdapat pada bukti-bukti penerimaan atau pengeluaran kas.

12) Cek saldo neraca dengan saldo menurut General Ledger (G/L) per tanggal pemeriksaan.

13) Cek saldo awal kas dengan dibuku besar dan saldo akhir pada kertas kerja pemeriksaan tahun lalu.

14) Lakukan trace atas angka-angka pada general ledger ke angka-angka yang terdapat pada jurnal voucher.

15) Teliti atas kebenaran cut off penerimaan dan pengeluaran kas untuk mengetahui apakah transaksi telah dibukukan dalam periode yang benar.

16) Buat daftar koreksi yang diperlukan.

17) Buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas dan petty cash.

Pelaksanaan pemeriksaan intern terhadap kas dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan terhadap kas. Adapun langkah-langkah dari program kerja pemeriksaan lanjutan tersebut sebagai berikut :

1) Usut saldo kas yang tercantum didalam neraca ke saldo rekening kas yang bersangkutan di dalam buku besar.

2) Hitung kembali saldo rekening kas di dalam buku besar.

3) Usut posting pendebitan dan pengkreditan rekening kas ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas.

4) Rekonsiliasi catatan kas dengan rekening koran bank.

5) Lakukan konfirmasi saldo kas di bank.

6) Periksa cek yang beredar pada tanggal neraca di dalam rekening koran bank.

7) Buatlah rekonsiliasi saldo kas menurut cut off bank statement dengan saldo kas menurut catatan.

8) Usut setoran dalam perjalanan (deposit in transit) pada tanggal neraca ke dalam cut off bank statement.

9) Periksa tanggal yang tercantum di dalam cek yang beredar pada tanggal neraca.

10) Periksa adanya cek kosong yang tercantum di dalam cut off bank statement.

11) Periksa semua cek di dalam cut off bank statement mengenai kemungkinan hilangnya cek yang tercantum sebagai cek yang beredar pada tanggal neraca.

12) Periksa jawaban konfirmasi dari bank mengenai batasan yang dikenakan terhadap pemakaian rekening tertentu di bank.

13) Lakukan wawancara dengan manajemen mengenai batasan penggunaan kas.

14) Buatlah daftar transfer bank dalam periode sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menemukan kemungkinan terjadinya check kitting.

15) Buat dan lakukan analisis terhadap rekonsiliasi empat kolom.

16) Periksa adanya kemungkinan pengggelapan kas dengan cara lapping penerimaan dan pengeluaran kas.

4.2.1.4. Pelaporan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Kas

Setelah melakukan pemeriksaan intern terhadap kas, selanjutnya pemeriksa menyusun rencana pengembangan temuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan atau program yang diperiksa.

Adapun tahap-tahap pengembangan temuan yang dilakukan oleh KKI adalah sebagai berikut :

1) Mengidentifikasikan secara khusus hal-hal yang merupakan kekurangan atau kelemahan yang diukur dengan kriteria atau tolak ukur yang lazim. Pada dasarnya dalam suatu pemeriksaan, pemeriksa membandingkan antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi juga sebelumnya pemeriksa harus meyakini kelayakan kriteria atau tolak ukur yang dipergunakan.
2) Pastikan sebab-sebab kelemahannya. Apabila pemeriksa ingin mengadakan pemeriksaan secara tepat, menyampaikan laporan dengan jujur serta efektif, dan mengembangkan rekomendasi tindakan korektif, maka

pemeriksa perlu mengidentifikasikan dan memahami sebab-sebab dari suatu kelemahan.

3) Tentukan apakah kelemahan itu merupakan kasus yang berdiri sendiri atau tersebar luas. Penentuan ini diperlukan untuk mencapai kesimpulan yang tepat mengenai arti penting kelemahan yang bersangkutan. Kesimpulan ini seringkali merupakan hal yang esensial untuk mendorong pimpinan objek yang diperiksa mengambil tindakan korektif bila pemeriksa yakin bahwa kondisi itu tersebar luas atau besar kemungkinannya akan terulang kembali, maka pemeriksa harus merekomendasikan perbaikan kesalahan tersebut secepat mungkin.

4) Tentukan akibat atau arti pentingnya kelemahan. Pemeriksa harus mempertimbangkan dengan sepenuhnya akibat atau arti pentingnya kelemahan dengan mengikuti cara manajemen melaksanakan kegiatan. Pemeriksa tidak saja perlu memperhatikan akibat langsung, tetapi juga akibat sampingan, akibat jangka panjang, atau akibat lainnya, baik yang nyata maupun yang potensial.

5) Kenali dan cari pemecahan persoalan hukum. Pengenalan dan penyelesaian segera persoalan hukum merupakan bagian penting dari kegiatan pemeriksaan dan

mempengaruhi temuan serta rekomendasi yang berhubungan dengannya.

6) Usaha mendapatkan komentar pejabat atau pihak yang langsung berkepentingan yang mungkin akan mengalami akibat negatif oleh pelaporan temuan tersebut. Pemeriksa harus memberikan kesempatan kepada pejabat atau pihak yang terkena secara negatif oleh pelaporan tersebut untuk membuat komentar tertulis atau penjelasan tambahan sebelum laporan dikeluarkan.

Dengan adanya pengembangan temuan dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, penyimpangan yang terjadi apabila dibandingkan dengan kriteria, sebab dan akibat penyimpangan tersebut serta dapat dirumuskannya rekomendasi yang diperlukan. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan dari pemeriksaan intern atas pengendalian kas yang memadai, berikut ini akan ditunjukkan contoh penerapannya pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yaitu terhadap laporan hasil pengawasan opname petty cash dan piutang dilingkungan unit otonom dimana dari laporan hasil pengawasan tersebut didapatkan temuan-temuan sebagai berikut

1) **Tahap persiapan perlu disempurnakan.**

Hal ini disebabkan antara lain :

(a) Belum adanya prosedur, ketentuan umum dan petunjuk pelaksanaan opname petty cash dan piutang secara tertulis sebagai pedoman kerja.

(b) Tidak adanya pengarahan kepada pelaksanaan, sebelum pelaksanaan kegiatan dilapangan.

(c) Sarana penunjang kegiatan dilapangan kurang memadai, seperti penyediaan kertas kerja dan sarana angkutan.

Hal ini dapat berakibat pelaksanaan kegiatan kurang optimal.

2) **Beberapa fisik invoice belum ditemukan.**

Untuk piutang yang masih outstanding, copy invoicenya disimpan pada Bagian Pendanaan dan penagihan. Dari hasil opname yang telah dilakukan ternyata beberapa invoice atas piutang yang masih outstanding belum ditemukan. Dalam rangka serah terima piutang dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat ke unit otonom sebaiknya didukung dengan invoicenya.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1) Tahap persiapan agar lebih disempurnakan, sehingga pelaksanaan opname dilapangan dapat berjalan dengan lancar, antara lain :
   - Dibuatkan ketentuan dan prosedur pelaksanaan opname.
   - Pengarahan seperlunya kepada pelaksana opname.
   - Menyiapkan kertas kerja yang diperlukan.
2) Bagian Pendanaan dan Penagihan sedapat mungkin agar berusaha mencari invoice-invoice yang belum ditemukan. Apabila tidak dapat ditemukan, maka pada saat serah terima piutang ke unit otonom agar dibuatkan catatan atau keterangan bahwa invoice belum ditemukan.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan antara lain :

1) Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, opname petty cash dan piutang secara rutin dilakukan satu tahun sekali yaitu pada setiap akhir tahun, sedangkan opname khusus dilakukan pada saat-saat tertentu seperti halnya pada pemisahan atau pembentukan unit otonom atau merger. Untuk itu pelaksanaan opname khusus

tersebut di atas mengacu pada pelaksanaan opname rutin akhir tahun. Disamping itu pelaksanaan opname petty cash dan piutang hanya melaksanakan pemeriksaan atau penelitian fisik di lapangan tehadap catatan di Bagian Akuntansi Keuangan, maka tindak lanjut Bagian Akuntansi Keuangan sebagai berikut :

(a) Ketentuan dan prosedur pelaksanaan opname tidak perlu dibuat, tetapi cukup disebut dalam surat penugasan opname.

(b) Pengarahan seperlunya kepada pelaksana opname telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana bagian tersebut, mengingat tugas opname tersebut merupakan penugasan bersama beberapa bagian.

(c) Kertas kerja telah dipersiapkan, hal ini terbukti pada opname sebelumnya telah berjalan lancar dengan menggunakan kertas kerja.

(d) Mengenai hal lainnya bahwa pelaksanaan opname petty cash dan piutang dalam rangka pemisahan unit otonom tersebut tidak memberikan honor kepada pelaksana, mengingat pelaksanaannya berlangsung dalam ruangan.

2) Masalah ini dianggap selesai, karena invoice-invoice tersebut sudah menjadi tanggung jawab unit otonom.

Dengan demikian berdasarkan contoh pelaksanaan pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan intern yang dilakukan KKI cukup memadai.

Mengingat tugas KKI dalam melaksanakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menilai efektivitas struktur pengendalian intern, maka hal ini telah terpenuhi oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dimana KKI dalam menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan pemeriksaan, khususnya terhadap kas telah menjalankan fungsinya dengan baik.

4.2. Evaluasi Terhadap Kegiatan Pemeriksaan Intern Atas Pengendalian Kas Oleh Satuan Pengawasan Intern Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Pemeriksaan intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dilaksanakan oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI), dimana KKI merupakan aparat pengawasan dalam perusahaan yang bertugas membantu General Manager dalam mengadakan penilaian terhadap sistem

pengendalian manajemen dan menguji pelaksanaannya bagi perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan.

KKI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh fungsi atau kegiatan atau bagian dilingkungan perusahaan dan memperolah bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan pemeriksaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan apabila dipandang perlu, tetapi KKI tidak memiliki wewenang ataupun tanggungjawab pada aktivitas yang diperiksanya, serta tidak boleh ikut mengendalikan atau mengarahkan tindakan operasi. KKI bertanggungjawab menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) bidang pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan operasional. Dalam penyusunan PKPT mengenai objek pemeriksaan, terdapat struktur isi yang mencakup tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, tim pemeriksaan, waktu pelaksanaan pemeriksaan dan rencana penerbitan laporan. Mengenai objek pemeriksaan yang potensial yang memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, agar menyusun skala prioritas pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang potensial, dimana hal tersebut agar memudahkan dan membantu pemeriksa untuk melakukan pengawasan terhadap objek-objek pemeriksaan. KKI dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan berpedoman kepada norma pemeriksaan SPI yang berlaku bagi BUMN atau BUMD dan mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan dengan manajemen tentang hasil pemeriksaan, menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan laporan triwulan hasil pemeriksaan pengawasan serta laporan tahunan perkembangan kondisi

KKI, memantau tindak lanjut atas temuan-temuan dan rekomendasi, serta menyusun Laporan Evaluasi Tindak Lanjut (LETL) triwulanan.

Kegiatan pemeriksaan intern yang dilaksanakan oleh KKI mencakup seluruh fungsi yang ada didalam perusahaan yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan antara lain dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan intern terhadap kas dengan mengacu kepada program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan, serta adanya pelaksanaan pemeriksaan lanjutan yang bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta dan temuan-temuan yang menjadi dasar penyusunan pendapat dan kesimpulan serta untuk mengembangkan saran perbaikan dimana informasi ini sangat penting sekali sebagai dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Kegiatan pemeriksaan intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan meliputi rencana jangka panjang, jangka pendek dan pemeriksaan terhadap objek. Pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari empat tahap antara lain persiapan pemeriksaan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan finalisasi hasil pemeriksaan. Sedangkan pelaporan hasil pemeriksaan merupakan sarana komunikasi resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, simpulan dan rekomendasi kepada manajemen. Sedangkan pemeriksaan tindak lanjut bertujuan

untuk meyakinkan apakah saran atau rekomendasi yang dikeluarkan dalam laporan hasil pemeriksaan telah dilaksanakan oleh objek pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas dilakukan oleh KKI dengan menguji pengendalian intern kas melalui kuesioner pengendalian intern terhadap kas dan pelaksanaan pemeriksaan mengacu pada program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan pertanggung jawaban keuangan, menentukan sah atau tidaknya transaksi kas,menilai ketepatan jumlah dan penyajian saldo kas dalam neraca dan meyakinkan bahwa saldo kas pada tanggal neraca benar-benar milik perusahaa. KKI juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan yang bertujuan untuk mendapatkan temuan-temuan guna memperbaiki kelemahan atau kekurangan didalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap kas, dimana dengan dengan adanya temuan-temuan tersebut dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, penyimpangan yang terjadi jika dibandingkan dengan kriteria, sebab dan akibat penyimpangan tersebut serta dapat dirumuskannya rekomendasi yang diperlukan sebagai dasar penyusunan pendapat dan kesimpulan, sehingga KKI dalam melaksanakan pemeriksaan intern terhadap kas telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian keberadaan KKI bagi pihak manajemen sangat membantu sekali di dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk semua fungsi yang ada pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, khususnya pemeriksaan intern atas pengendalian kas, sehingga dapat dikatakan

BAB V

RANGKUMAN KESELURUHAN

Pada dasarnya setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur mempunyai suatu tujuan yaitu untuk memperoleh laba yang optimal. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan memerlukan manajemen di dalam perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian yang memadai terhadap semua sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan.

Kas adalah salah satu sumber daya ekonomi yang selalu menarik perhatian dan sangat mudah untuk diselewengkan. Mengingat sifat-sifatnya tersebut, maka mengelola kas dalam perusahaan memerlukan perhatian yang cukup serius. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengelola kas adalah perencanaan arus kas, pengendalian penerimaan kas, pengendalian pengeluaran kas, melakukan rekonsiliasi bank dan penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil.

Perusahaan harus mempertahankan uang kas yang mencukupi untuk operasionalnya dan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo. Manajemen kas yang efektif juga memerlukan pengendalian untuk melindungi kas terhadap pencurian dan penggelapan. Sistem pengendalian kas mempunyai karakteristik dasar seperti, menetapkan tanggungjawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas, pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas, penyetoran seluruh kas diterima setiap hari, sistem voucher untuk mengendalikan pengeluar internal pada selang waktu yang tak terduga, dan pencatatan ganda a adanya keterbatasan yang dimiliki manajemen dalam mer

bahwa kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sudah cukup memadai.

perusahaan, maka dibentuklah bagian Audit Internal untuk membantu manajemen yang berfungsi sebagai pengawas. Istilah bagian Audit Internal didalam lingkungan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dikenal dengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI), sedangkan untuk tingkat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi sendiri disebut Kesatuan Kontrol Intern (KKI). Dengan berfungsinya bagian Audit Internal, akan turut membantu tercapainya target dan sasaran yang telah digariskan, dengan cara melakukan aktivitas pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada dan menyampaikan berbagai analisis, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi mengenai kegiatan yang diperiksanya.

Faktor-faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam membentuk Bagian Audit Internal adalah status Bagian Audit Internal yang mencakup struktur organisasi, tugas dan wewenang Bagian Audit Internal dalam perusahaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dijalankan oleh Bagian Audit Internal. Status Bagian Audit Internal harus dapat menunjang independensi dan objektivitas, sedangkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan merupakan kegiatan terpadu yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk memilih judul: **"Evaluasi Terhadap Kegiatan Pemeriksaan Intern Atas Pengendalian Kas Oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat".**

Dari uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

a) Bagaimana kegiatan pemeriksaan intern dan pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat ?

b) Apakah kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas yang dilakukan oleh Kesatuan Kontrol Intern (KKI) pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat telah memadai ?

Fungsi manajemen yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan fungsi manajemen secara keseluruhan salah satunya adalah pengendalian. Maka dari itu pengendalian harus mendapatkan perhatian dari manajemen yang sama baiknya dengan fungsi lainnya. Pengendalian yang dilakukan oleh manajemen diantaranya adalah pengendalian kas. Kas sering kali menjadi sasaran pencurian dan penggelapan karena kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid, maka kas harus diperhatikan secara khusus oleh manajemen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu mengelola kas adalah perencanaan arus kas, pengendalian penerimaan kas, pengendalian pengeluaran kas, melakukan rekonsiliasi bank dan sistem dana tetap untuk kas kecil.

Sistem pengendalian kas harus memenuhi karakteristik dasar seperti menetapkan tanggungjawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas, pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas, penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari ke bank, sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran kas, audit internal pada selang waktu yang tak terduga dan pencatatan ganda atas kas menurut bank dan pembukuan, dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh seseorang diluar bagian akuntansi. Manajemen sedapat mungkin menjalankan pengendalian

internal yang efektif dan efisien, untuk mengurangi peluang-peluang pencurian, penggelapan dan kesalahan yang tidak disengaja dalam akuntansi dan pengendalian kas. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh manajemen, maka manajemen tidak mungkin dapat mencurahkan perhatiannya kepada seluruh aspek pengelolaan yang ada. Oleh sebab itu manajemen membutuhkan suatu organisasi yang independen untuk membantu manajemen dalam melakukan pengendalian terhadap jalannya perusahaan khususnya pengendalian terhadap kas, dengan membentuk Kesatuan Kontrol Intern (KKI) yang berfungsi sebagai pengawas.

Kegiatan pemeriksaan Intern yang dilakukan oleh KKI merupakan kegiatan yang terpadu yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perencanaan merupakan suatu proses yang mencakup penentuan terlebih dahulu bidang-bidang kerja yang akan dicakup dalam pemeriksaan, kebutuhan tenaga pemeriksa, prosedur yang akan dipakai dan sistematika pelaksanaan pemeriksaan. Tanpa adanya rencana kerja, akan timbul kecenderungan untuk menghindari atau menunda penugasan atau sebaliknya menunggu penugasan baru sehingga waktu tersita tanpa hasil. Oleh karena itu pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan selalu mengacu pada misi perusahaan. Pelaksanaam pemeriksaan terdiri dari empat tahapan yaitu persiapan pemeriksaan, pemeriksaa pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan finalisasi hasil pemeriksaan. Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan tersebut merupakan sarana komunikasi resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan infornasi tentang temuan, kesimpulan dan rekomendasi kepada manajemen atau pejabat yang

perlu mengetahui informasi tersebut. Setiap objek yang diperiksa harus melaksanakan rekomendasi yang telah dikemukakan oleh tim pemeriksa intern sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dengan demikian, KKI adalah salah satu alat yang dapat membantu manajemen untuk melakukan kegiatan tersebut. Ditinjau dari aspek organisasi dan kegiatan pemeriksaan KKI dengan penekanan atas pengendalian kas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri PUTL Nomor 013/PRT/1957 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN mengadakan reorganisasi menyangkut nama, tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dengan sebutan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Barat. (Lembaran Negara No. 34 tahun 1994).

PT Perusahaan Listrik Negara Unit Bisnis Distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkitan dan transmisi. Unit ini "membeli" energinya dari unit Perusahaan Listrik Negara lainnya, yang diterima diout going Gardu Induk (GI). Seluruh Pulau Jawa menyerap hampir 80 % volume

penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh 4 Perusahaan Listrik Negara Unit Bisnis Distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satu Unit Bisnis Distribusi tersebut adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, yaitu berlokasi di Jl. Cikapundung No. 2 Bandung, Jawa Barat.

Pemeriksaan intern merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dimana kegiatan tersebut bebas dari pengaruh pihak-pihak lain yang ada dalam perusahaan sehingga pekerjaannya dapat memberikan gambaran yang objektif. Kegiatan yang dicakup oleh pemeriksaan intern meliputi seluruh kegiatan yang dalam perusahaan.

Pemeriksaan intern harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan ditetapkan secara tertulis oleh manajemen perusahaan. Dengan adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas berarti ada dukungan yang kuat dari manajemen sehingga pemeriksa intern dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan padanya. Pemeriksa intern memiliki wewenang untuk menyusun rencana dan program pemeriksaan secara menyeluruh, melakukan pemeriksaan sesuai rencana dan program tersebut serta menguji dan mengevaluasi pengendalian manajemen pada setiap aktivitas perusahaan. Sedangkan tanggung jawab pemeriksaan intern tercermin pada tugas yang dibebankan padanya. Tanggung

jawab tersebut umumnya meliputi pemberian informasi dan saran pada manajemen dan melakukan koordinasi antara kegiatan pemerikasaan intern dengan kegiatan manajemen, sehingga tujuan pemerikasaan dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara bersamaan.

Pemeriksaan intern bertujuan untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dengan menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat dan informasi mengenai kegiatan objek yang diperiksa untuk meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Ditribusi Jawa Barat dibentuk Kesatuan Kontrol Intern (KKI) yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. Kedudukan KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berada di bawah General Manager. Kedudukan KKI tersebut menunjukan independensi yang nyata dengan adanya pemisahaan organisasi KKI dengan unit organisasi operasional dan fungsional lainnya.

KKI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh fungsi atau kegiatan atau bagian dilingkungan perusahaan dan memperoleh bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan pemeriksaan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan apabila dipandang perlu, tetapi KKI tidak memiliki wewenang ataupun tanggung jawab pada aktivitas yang periksanya serta tidak boleh ikut mengendalikan atau mengarahkan tindakan operasi. KKI bertanggung jawab menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang pemeriksaan keuangan dan pemerikasaan operasional, melaksanakan pemeriksaan yang berpedoman kepada norma pemeriksaan SPI yang berlaku bagi BUMN/BUMD dan mengkoordinasikan kegiatan

pemeriksaan dengan manajemen tentang hasil pemeriksaan, menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan laporan triwulanan hasil pemeriksaan pengawasan serta laporan tahunan perkembangan kondisi KKI, memantau tindak lanjut atas temuan-temuan dan rekomendasi, serta menyusun Laporan Evaluasi Tindak Lanjut (LETL) triwulanan.

Tujuan pemeriksaan KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat yaitu menilai kecukupan, efektivitas dan efisiensi serta pelaksanaan sistem pengendalian manajemen yang berjalan dalam perusahaan juga menilai kesesuaian dan pelaksanaannya dengan perundang-undangan, peraturan, strategi dan kebijakan perusahaan. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan KKI antara lain melakukan pemeriksaan atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan, menilai penyimpangan dari standar operasi, menilai manfaat dari suatu kegiatan atau program yang direncanakan, serta melakukan pemeriksaan khusus (investigasi) terhadap tindak penyelewengan atau kecurangan.

Kegiatan pemeriksaan intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat meliputi perencaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan serta pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan meliputi rencana pemeriksaan jangka panjang, jangka pendek dan pemeriksaan terhadap objek. Pelaksanaan pemeriksaan tirdiri dari empat tahap antara lain persiapan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan finalisasi hasil pemeriksaan. Sedangkan pelaporan hasil pemeriksaan merupakan sarana komunikasi resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan

informasi tentang temuan, simpulan dan rekomendasi kepada manajemen. Pemeriksaan tindak lanjut bertujuan untuk meyakinkan apakah saran atau rekomendasi yang dikeluarkan dalam laporan hasil pemeriksaan telah dilaksanakan oleh objek pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas dilakukan oleh KKI dengan menguji pengendalian intern kas melalui kuesioner pengendalian intern terhadap kas dan pelaksanaan pemeriksaan mengacu pada program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan yang bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan pertanggung jawaban keuangan, menentukan sah atau tidaknya transaksi kas, menilai ketepatan jumlah dan penyajian saldo kas dalam neraca dan meyakinkan bahwa saldo kas pada tanggal neraca benar-benar milik perusahaan. KKI juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan yang bertujuan untuk mendapatkan temuan-temuan guna memperbaiki kelemahan atau kekurangan di dalam pelaksanaan pemeriksaan intern terhadap kas, dimana dengan adanya temuan-temuan tersebut dapat diketahui kondisi yang sebenarnya, penyimpangan yang terjadi jika dibandingkan dengan kriteria, sebab dan akibat penyimpangan tersebut serta dapat dirumuskannya rekomendasi yang diperlukan sebagai dasar penyusunan pendapat dan kesimpulan, sehingga KKI dalam melaksanakan pemeriksaan intern terhadap kas telah menjalankan tugasnya dengan baik.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari uraian Hasil dan Pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

6.1.1. Simpulan Umum

Dari hasil evaluasi terhadap kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas oleh Kesatuan Kontrol Intern pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dinilai cukup memadai, hal ini terlihat dengan adanya :

1) Hasil pengujian pengendalian intern yang telah dilakukan terhadap kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.
2) Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.
   (a) KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dalam melakukan pemeriksaan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berlaku bagi BUMN atau BUMD.

(b) KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dalam melakukan pemeriksaan intern atas pengendalian kas mengacu pada program kerja pemeriksaan.

Dengan demikian penulis mengambil kesimpulan bahwa hasil kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat sudah cukup memadai.

6.1.2. Simpulan Khusus

1) Pelaksanaan pemeriksaan intern atas pengendalian kas pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

   (a) Dalam melaksanakan pemeriksaan intern atas pengendalian kas, KKI pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berlaku bagi BUMN atau BUMD, dimana penetapan obyak pemeriksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahuanan (PKPT), kecuali ada hal-hal khusus yang dipandang penting oleh General Manager.

   (b) KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat dalam melaksanakan pemeriksaan intern atas pengendalian kas mengacu pada program kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan sebelum pemeriksaan dilaksanakan.

Tugas KKI dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengendalian kas bertujuan :

a. Memeriksa kelengkapan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban keuangan.
b. Menentukan sah atau tidaknya transaksi kas.
c. Menilai ketepatan jumlah penyajian saldo kas dalam neraca.
d. Meyakinkan bahwa saldo kas pada tanggal neraca benar-benar milik perusahaan.

2) Hasil evaluasi dari kegiatan pemeriksaan intern atas pengendalian kas KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap kas yang bertujuan untuk mendapatkan temuan-temuan guna memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang ada didalam pelaksanaan pemeriksaan untuk kemudian dirumuskan rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis mencoba memberi saran kepada KKI PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat, yaitu sebaiknya KKI menyusun juga Program Kerja Pemeriksaan terhadap KUD, karena KUD merupakan unit yang terkait langsung terhadap penerimaan kas PLN dari pelanggan, maka dari itu kas harus diawasi terus keberadaannya dan KKI juga dapat mengawasi kegiatan KUD khususnya terhadap kas PLN.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amin Widjaja Tunggal. **Auditing: Suatu Pengantar**. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

2. ..... **Struktur Pengendalian Intern**. Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

3. Arens, Alvin A., and Loebbecke, James K. **Auditing : Pendekatan Terpadu**. Dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf. Buku Dua. Edisi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat, 1996.

4. Arief Suadi. **Sistem Pengendalian Manajemen**. Yogyakarta : BPFE UGM, 1996.

5. Bambang Hartadi. **Internal Auditing: Suatu Tujuan Sistem Informasi Manajemen dan Cara Pelaporannya**. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1991.

6. Bambang Hartadi dan Subekti Djamaluddin. **Auditing II: Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pemelaksanaan**. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM, 1990.

7. Bambang Susanto. **Manajemen Akuntansi**. Cetakan Pertama, Jakarta: PT Sansu Moto,1995.

8. Firdaus A. Dunia. **Modul Pengantar Akuntansi I**. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI,1999.

9. Hamer, H. Lawrence, William K. Charter and Milton F. Usry. **Cost Accounting.** Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co., 1995.

10. Hiro Tugiman. **Pengenalan Internal Audit**. Yogyakarta: Karnisius, 1996.

11. ..... **Standar Profesional Audit Internal**.Yogyakarta: Karnisius, 1997.

12. Holmes, Arthur W., and Davidc. Burns. **Auditing : Norma dan Prosedur**. Dialihbahasakan oleh Marianus Sinaga, SE., Ak. Edisi Kesembilan. Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993.

13. Ikatan Akuntansi Indonesia. **Standar Akuntansi Keuangan**. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1994.

14. Machmud, Ali. **Pengantar Akuntansi II**. Jakarta : G.D., 1993.

15. Mulyadi. **Pemeriksaan Akuntan**. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE-YKPN, 1992.

16. M. Munandar. **Pokok-pokok IntermediateAccounting.** Edisi Keenam. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

17. R.A. Supriyono. **Akuntansi Manajemen**. Yogyakarta: BPFE UGM, 1991.

18. Ruchyat Kosasih. **Auditing : Prinsip dan Prosedur**. Edisi kelima. Jakarta : Penerbit Ruchko Bandung, 1993.

19. Sukrisno Agoes. **Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik**. Jilid I. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1996.

20. ..... **Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik**. Jilid II. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1996.

21. Taylor, Donald. H., and Glezen, G. William. **Auditing: Integreted Concepts and Procedures.** 6th Edition. Canada: John Wiley and Sons, Inc, 1995.

22. Theodorus. M. Tuanakota. **Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Akuntan Publik**. Edisi Ketiga. Jakarta: LPFE-UI, 1990.

23. Waren, Fess, Reeve. **Accounting**.18th Edition. South Western Colledge Publishing,1996.

LAMPIRAN

Struktur Organisasi PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI J AWA BARAT

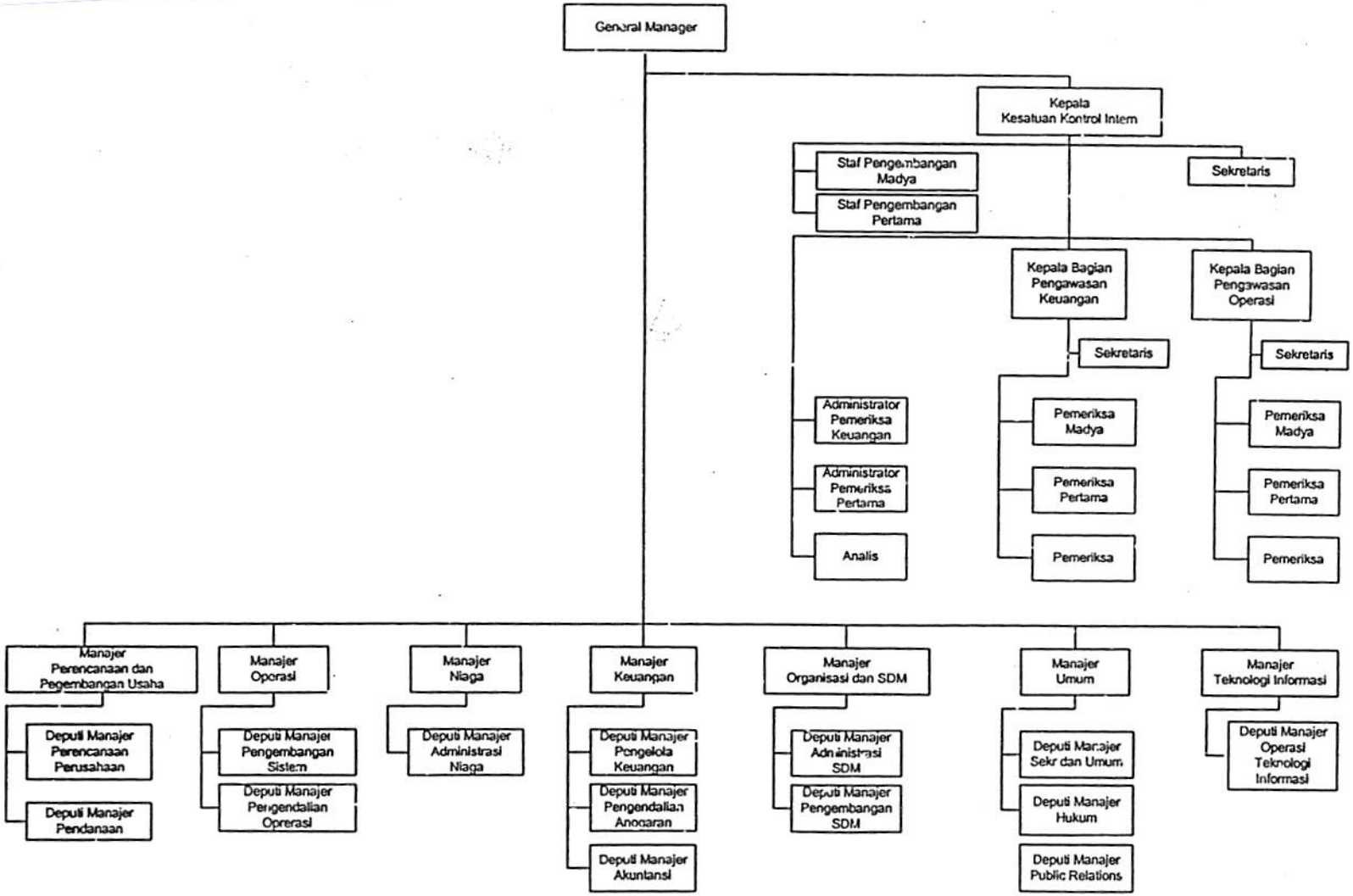

LAMPIRAN 2

P.T. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA BARAT

an.Cikapundung Barat No. 2 Bandung
: 4230747 (Hunting) Telex : 28335 pln djbla Alamat Kawat : pln djb Bd.
ak Pos : 804 Facsimile : (022) 4230822 Bank : Bank BNI 46 Cab. Bandung
BRI Cab. Bandung

SURAT TUGAS

No. : 057 .Stg/ 090 /UBD JABAR /2002

GENERAL MANAGER PT.PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

Memberikan tugas kepada Tim Auditor Internal terdiri dari : 1. KAI - Pengawas
2. D. Soekendar K. - Ketua Tim
3. A Pane - Anggota
4. Adjat Sutardjat - Anggota
5. Adjid Hernawan - Anggota
6. A.T. Sumantri - Anggota

Untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan Operasional di : PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat Cabang Bandung
Dasar Pemeriksaan : PKPT Tahun 2002
Ruang Lingkup dan Sasaran : - Laporan Keuangan
- Kinerja Strategis (antara lain : Susut, Tunggakan dan Ketidak puasan Pelanggan).
- Tertib Admnistrasi & Ketaatan terhadap Ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Periode yang diperiksa kegiatan Operasional : Triw. I Tahun 2001 s/d Triw II Tahun 2002 (Mei 2002)
Jangka waktu pemeriksaan : Tanggal 19 Juni 2002 s/d 11 Juli 2002

cpada Cabang /Unit yang diperiksa agar memberikan bantuan.

Bandung, 11 Juni 2002
GENERAL MANAGER

PT PLN (Persero) KANTOR DISTRIBUSI UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

AGUS PRANOTO

embusan :

T. PLN (Persero) Unit Bisnis
istribusi Jabar Cabang Bandung

Form.srt.tugas-kontrin-4

TABEL 1
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

IKELUARKAN OLEH	PROSEDUR PEMERIKSAAN KKI	REF. NO : INA/3/OA/002		
		HAL : 8 DARI 30		
		TANGGAL DIKELUARKAN		
KKI	II. KEBIJAKSANAAN	10	4	1998

NO	KEGIATAN	AT	KT	PGS	KA.KKI	ADM
I	PERSIAPAN PEMERIKSAAN					
	1. Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan	-	-	-	O,T	D
	2. Penyusunan Rencana Pemeriksaan dan Program Kerja Persiapan Pemeriksaan	-	O,P	R,P	R	-
	3. Pengumpulan Informasi tentang obyek	O	-	-	-	O
	4. Penyusunan Daftar Pertanyaan	O	R,P	R	-	-
	5. Pembuatan Memo Dinas	-	-	O,P	T	D
II	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN					
	1. Wawancara dan Survey Pendahuluan	O	O	O	-	-
	2. Penyusunan Program Pemeriksaan Pendahuluan	-	O,P	R,P	-	-
	3. Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan	O	O,R	R	-	-
	4. Penyusunan KKP, Kesimpulan/Ikhtisar Pendahuluan	O	R,P	R,P	-	-
	5. Persentasi Pendahuluan	H	H	O	R	-
III	PEMERIKSAAN LANJUTAN					
	1. Penyusunan Program Pemeriksaan Lanjutan	-	O,P	R,P	-	-
	2. Pelaksanaan Pemeriksaan lanjutan	O	O,R	R	-	-
	3. Penyusunan KKP, Kesimpulan/Ikhtisar Lanjutan	O	R,P	R,P	-	-
	4. Penyusunan Konsep Temuan/LOR Sheet	O	R,P	R,P	-	-
	5. Persentasi Lanjutan	H	H	O	R	-
IV	FINANSIAL HASIL PEMERIKSAAN					
	1. Penyusunan Konsep LHP	-	O	R	-	-
	2. Pembahasan dengan Obyek Pemeriksaan	O	O	O	-	-
	3. Penyusunan Notulen Rapat Konsep LHP	O,D	R,T	T	-	-
	4. Finansial LHP	-	O	R,P	R,T	D
	5. Penyusunan Eksekutif Summary	-	-	O	R,T	D
V	PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT					
	1. Pemeriksaan/Pembahasan Tindak Lanjut	-	O	O	-	-
	2. Penetapan Status Tindak Lanjut	-	-	O,T	-	-
	3. Penyusunan laporan Tindak Lanjut	-	-	-	R,T	O,D
VI	RAPAT KOORDINASI DUA MINGGUAN	O	O	O	-	-

KETERANGAN : O = Melaksanakan kegiatan ; R = Proses Review ; P = Paraf ; T = Tanda tangan ; D = Distribusi ; H = Hadir ; AT = Anggota Tim ; KT = Ketua Tim ; PGS = Pengawas ; ADM = Administrasi

PT. PLN (PERSERO)
UBD JABAR & BANTEN
AUDITOR INTERNAL

1. Surat Tugas No./ tanggal : 039.STg/090/UBD JABAR & BANTEN /2002 tgl 30-4- 2002 5. Halaman No : 1 /2
2. Objek Pemeriksaan : PT. PLN (Persero) UBD JABAR & BANTEN Cabang Cianjur 6. Disusun oleh : Ketua Tim
7. Tanggal Pemeriksaan : 08/5 s.d.28/05
3. Sasaran Pemeriksaan : Kegiatan Operasional Cabang. 8. Review oleh : Pengawas.
4. Periode Pemeriksaan : Triw. I thn .2001 Triw I thn 2002

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP)
No. 039.PKP./090/ UBD JABAR //2002

INSTRUKSI No	URAIAN	DILAKSANAKAN OLEH	WAKTU YG DIPERLUKAN
I	**PENDAHULUAN** P T. PLN (Persero) UBD Jabar & Banten Cabang Cianjur Merupakan Unit PT. PLN (Persero) UBD Jabar & Banten dgn Keputusan Direksi PT.PLN (Persero), No.28.K/010/DIR/2001 tanggal 28 Pebruari 2001.		
II	**TUJUAN PEMERIKSAAN** Untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan Operasional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan Direksi PLN yang berlaku.		
III	**RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN** 1. Tertib Administrasi pengurusan uang dan barang. 2. Ketaatan pada perundang-undangan yang berlaku. 3. Efektifitas pengendalian intern. 4. Efisiensi dan kehematan penggunaan uang dan barang. 5. Tercapainya target sesuai dengan rencana.		
IV	**SASARAN PEMERIKSAAN** Revenue/ Protection Losses Tunggakan Keuangan , Akuntansi, Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Borongan Operasi, Pemeliharaan Sumber Daya Manusia		
V	**INSTRUKSI - INSTRUKSI**		
	A. PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT Periksa pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lalu MHP No.014.MHP/090/D.III/2001/CJR tanggal	Maman D.	
	B. PEMERIKSAAN PERIODE INI 1. Revenue / Protection.		
	1.1. Periksa permohonan pemasangan baru/tambah daya dan S.P jual beli tenaga listrik dan pelaksanaan penyambungan.,Cicilan pembayaran BP. 1.2 Periksa Pelaksanaan PPTL, Cek pelanggan yang belum membayar TS (lokasi), Apakah aliran listrik masih menyala,. 1.3 Minta B.A OPAL dan Pehitungannya 1.4 Cek Koordinasi Petugas PPTL, Keuangan dan Akuntansi	Maman D Pane Adjat Adjid	

LAMPIRAN 5

P.T. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT
KONTROL - INTERN

SURAT TUGAS NO. / TGL : .....
OBYEK PEMERIKSAAN : .....
KEGIATAN / FUNGSI YANG DIPERIKSA : .....
PERIODE PEMERIKSAAN : .....

5. HALAMAN : .....
6. DISUSUN OLEH : .....
7. TANGGAL / PARAF
8. DIREVIEW OLEH : .....
9. TANGGAL / PARAF : .....

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KPP)

NOMOR : /KKP/ /20....

T. PLN (PERSERO)
TRIBUSI JAWA BARAT
:ONTROL INTERN

DAFTAR TEMUAN DAN USUL REKOMENDASI (DTR)

CABANG : CIANJUR

SURAT TUGAS No : 014.STg/090/D.III/2000 Tgl 16 Pebruari 2000
PERIODE PEMERIKSAAN : TRW. III,IV Th. 2000 S/D Jan. 2001
SASARAN PEMERIKSAAN : Operasional dan Keuangan

0	KONDISI - KRITERIA	KODE PRM	SEBAB- AKIBAT	USUL REKOMENDASI	TANGGAPAN
	2	3	4	5	6
	Berdasarkan harga satuan untuk kabel NYY uk 1 x 95 Qmm Adalah Rp 31.083,-/meter, Sehingga terdapat kelebihan harga untuk SPKL No. 148 Sebesar Rp 292.230,- Seharusnya Harga satuan untuk barang yang sejenis harus sama .				
	4. Seksi Operasi 1. SAIDI/SAIFI - Laporan Saidi/Saifi dari Cabang Ke Kantor Distribusi yang merupakan laporan gabungan dari Kantor Cabang /Ranting dan Kantor Jaga tidak menampilkan Seluruh gangguan/pemadaman yang terjadi di sistim Distribusi, tetapi hanya gangguan di wilayah kerja Kantor Cabang yang mengakibatkan padamnya Konsumen atau jatuhnya PMT penyulang di GI Cianjur dan Lembur situ . - Dalam perhitungan Energi yang hilang, KVA padam pelanggan (daya ratarata/plg X Jml plg x Jml gangguan X Kva/plg X factor beban). Disesuaikan dengan KVA tersambung pelanggan (Factor beban = 1) sehingga KVA padam menjadi terlalu besar . Seharusnya: Laporan Saidi/Saifi dan energi yang hilang merupakan Laporan gabungan dari wilayah kerja kantor cabang		Sebab : - Data pemadaman dari Cabang dan Ranting /Kantor Jaga tidak akurat. - Petugas tidak dibekali cara menger jakan/mengolah data pendukung bahan pembuatan angka SAIDI/ SIFI dan energi yang hilang. Akibat : - Angka SAIDI/SAIFI dan energi yang hilang tidak dapat menggambarkan keadaan sebenarnya jaringan distribusi dan sistim pasokannya. - Program perbaikan Mutu dan keandalan jaringan tidak Mengenai sasaran.	- Agar mengatur kembali mekanisme laporan pemadamandari KJ s/d Cabang. - Cabang agar memberi penerangan kembali khusus untuk pembuatan dan manfaat SAIDI/SAIFI dan energi yang hilang. - KD mengevaluasi kembali pelaporan SAIDI/SAIFI.	

PERNYATAAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN
AUDIT INTERNAL
PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

Menunjuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) / Daftar Temuan dan Materi Usul Rekomendasi Audit Internal PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat No. 039.LHP/090/UBD.JABAR /2002 -R/CJR tanggal 28 Mei 2002, dengan ini kami memberikan pernyataan sebagai berikut :

a. Isi Laporan telah / ~~belum~~ *) dijelaskan kepada kami.
b. Keterangan dan data yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa telah kami penuhi, kecuali :

Keterangan / data :	Dengan alasan :
1).	1). .....
2).	2). .....
3).	3). .....
4).	4). .....

c. Tindakan Lebih Lanjut (follow up) yang telah / akan kami lakukan adalah sebagai berikut :

1. Akan ditindak lanjuti setelah LHP dan Memorandum diterima.
2. .....
3. .....
4. .....

d. Dengan ini kami ~~menyampaikan~~ / tidak menyampaikan *) catatan :
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

e. Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.

Cianjur, 28 Mei 2002
Nama (Pet.) : DJOKO R. ABUMANAN
No. Induk : 56085004.L
Sat. Adm. : Cabang Cianjur
Tanda tangan :

PT. PLN (Persero) CABANG CIANJUR UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

*) Coret salah satu.

LAMPIRAN 8

P.T. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA BARAT

UNIT : .....

BUKTI BANK PENERIMAAN

No. : .....

URAIAN	Rupiah	KETERANGAN
Diterima dari		
Nota kredit dari Bank ..... No. : ..... Tgl. :		Diterima dengan cek / Giro No. ..... Tgl. ..... Sebesar Rp. .....
Terbilang	Kode Perkiraan	Telah diperiksa / dibuku : .....

Mengetahui

(.....)
Nama jelas

..... , ...20 ...
Yang menerima

(.....)
Nama jelas

A5 Model 2364

PT PLN (PERSERO)
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

No. : .....

BUKTI BANK PENGELUARAN

UNIT : .....

Uraian	Rupiah	Keterangan
Dibayar melalui Bank ..... Untuk		
Nota Debet dari Bank ..... No. : ..... Tgl. :		Dibayar dengan cek / giro ..... No. ..... Tgl. ..... Sebesar Rp. .....
Terbilang	Kode Perkiraan	Telah diperiksa/dibuku : .....

Mengetahui

(.....)
Nama Jelas

Setuju bayar

(.....)
Nama Jelas

..... , ... 20 .....
Yang menerima

(.....)
Nama Jelas

Model 2364A

LAMPIRAN 10

P.T. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA BARAT

KUITANSI

No. : 91825

UNIT : .....

Terima dari : .....

Uang sebanyak : Rupiah

Untuk pembayaran :

.....

.....

.....

..... 20...

TERBILANG Rp.

KUITANSI INI SAH BILA ADA CAP TANDA TANGAN PEMIMPIN PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT DENGAN KAS REGISTER

P.T. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA BARAT

A5 Model 2386

PT PLN (PERSERO)
UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

ılan Cikapundung Barat No. 2 Bandung
ıp. : 4230747 (Hunting)
ıtak Pos : 804

Web : http:/www.pln-jabar.co.id
Facsimile : (022) 4230822

Bank : Bank BNI 46 Cab. Bandung
BRI Cab. Bandung

14 Agustus 2002

SURAT KETERANGAN

NO : 032.SKt/07/UBD JABAR/2002

Yang bertanda tangan ini bawah ini menerangkan, bahwa :

Nama : Rusli Mulana
NPM : 022196214 / 41043403960604

Mahasiswa Universitas Pakuan (Fakultas Ekonomi) Bogor, telah melaksanakan Penelitian di Audit Internal Bidang Audit Internal PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat mulai tanggal 1 Mei 2002 s/d 31 Mei 2002.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat digunakan seperlunya.

a.n. GENERAL MANAGER
MANAJER BIDANG ORGANISASI & SDM
u.b.
DEPUTI MANAJER PENGEMBANGAN SDM

PT PLN (Persero) KANTOR DISTRIBUSI UNIT BISNIS DISTRIBUSI JAWA BARAT

WAHYU SULAEMAN